



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYEDIAAN KPR
BAGI ANGGOTA TNI AL
(Studi Kasus Penyediaan KPR
Di Satker Denmabesal)**

Tugas Akhir Program Magister

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

**Sri Pudyorini
NIM 014287633**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA, 2007**

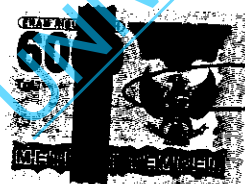
**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

Jakarta 2007

PERNYATAAN

Tesis yang berjudul *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYEDIAAN KPR BAGI ANGGOTA TNI AL (Studi Kasus Penyediaan KPR di Satker Denma Mabasal) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Jakarta, Agustus 2007



Yang menyatakan

SRI PUDYORINI

NIM: 014287633

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PENYEDIAAN KPR BAGI ANGGOTA TNI AL (Studi
Kasus Penyediaan KPR di Satker Denma Mabasal)

Penyusun Tesis : Sri Pudyorini

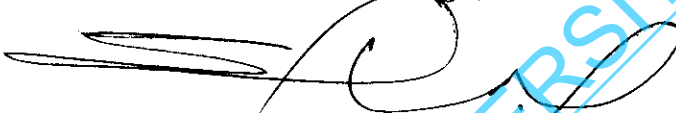
NIM : 014287633

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : 14 Agustus 2007

Menyetujui :

Pembimbing I,



Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag. Rer. Publ

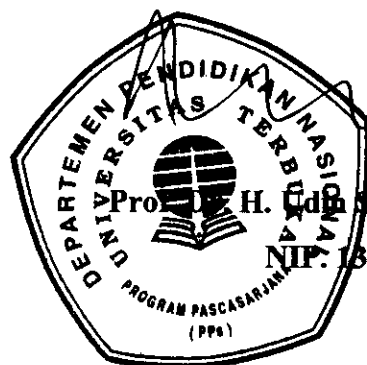
Pembimbing II,



Dr. Suciati, M.Sc

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Uda S. Winataputra, MA

NIP. 130367151

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Sri Pudyorini
 NIM : 014287633
 Program Studi : Magister Administrasi publik
 Judul Tesis : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYEDIAAN KPR BAGI ANGGOTA TNI AL (Studi Kasus Penyediaan KPR di Satker Denma Mabesal)

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana,
 Program studi Administrasi Publik, universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal : 14 Agustus 2007

Waktu : 13.00 – 15.00 WIB

Dan telah dinyatakan **L U L U S**

PANITIA PENGUJI TESIS

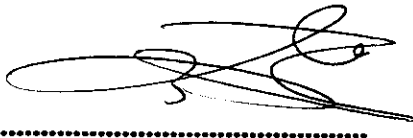
Ketua Komisi Penguji :

Dr. Suciati, M. Sc.



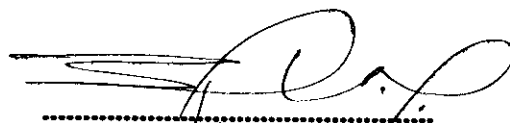
Penguji Ahli :

Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D



Pembimbing

1. Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag. Rer Publ.



2. Dr. Suciati, M. Sc.



ABSTRAK

SRI PUDYORINI

“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYEDIAAN KPR BAGI ANGGOTA TNI AL (STUDI KASUS PENYEDIAAN KPR DI SATKER DENMA MABESAL)”.

x + 98 halaman, 3 gambar, 23 tabel, 3 lampiran

Tesis ini membahas analisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL dengan suatu kasus penyediaan KPR di Satker Denma Mabesal. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL. Dan, untuk mencari upaya-upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pokok masalah dalam penelitian adalah penyediaan KPR untuk anggota TNI AL diindikasikan kurang optimal dimana dimensi-dimensi dari *Good Governance* cenderung tidak dapat diterapkan dan bersifat tertutup, sehingga fungsi penyediaan KPR untuk anggota TNI AL belum optimal. Artinya, penyediaan KPR tidak *transparent, accountable dan responsive*.

Untuk menganalisa masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* melalui pendekatan studi *kuantitatif dan kualitatif*. Sedangkan untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan, didukung data dari hasil angket yang disebarakan secara terstrata sesuai golongan pangkat dan sebaran lokasi KPR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dimensi-dimensi *Good Governance* dalam penyediaan KPR sudah cukup optimal dengan nilai rata-rata hasil angket dari jawaban responden sebesar 3,37 atau berkriteria 'Cukup'. Sedangkan perincian nilai interpretasi responden dari tiap dimensi adalah sebagai berikut : Transparansi sebesar 2,59 (Buruk), Akuntabilitas sebesar 3,97 (Baik), Keadilan sebesar 3,46 (Baik) dan Responsivitas sebesar 3,47 (Baik). Adanya indikasi pada dimensi 'transparansi' diinterpretasikan 'buruk' karena sangat kurangnya komunikasi dua arah dalam arus informasi dan aspirasi. Hal ini ditenggarai oleh adanya arus informasi hampir 90 % dapat diperoleh akan tetapi langkah konkret berupa partisipasi anggota untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan adalah 'nihil'.

Asumsi pertama yang penulis ajukan bahwa *penyediaan KPR untuk anggota TNI AL diselenggarakan dengan memenuhi unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, adil dan responsif* adalah 'dapat diterima'. Asumsi yang kedua bahwa *penyediaan KPR untuk anggota TNI AL dapat terselenggara dengan optimal, apabila penyediaan KPR diselenggarakan memenuhi unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, adil dan responsif serta memenuhi harapan dari anggota yang menerima KPR* adalah 'dapat diterima'.

Hambatan langsung langsung berupa komunikasi yang bersifat searah maupun hambatan tidak langsung seperti hubungan yang kaku antara atasan dengan bawahan, semuanya bersumber pada keberadaan instansi yang menyediakan KPR TNI AL adalah organisasi militer yang cenderung 'tertutup' dalam proses penyediaan KPR TNI AL.

Upaya kearah transparansi dan memberikan pelayanan prima tampaknya sudah ada 'itikad baik' berupa media 'saran dan evaluasi' melalui surat dan SMS.

Atas dasar hasil penelitian tersebut disarankan bahwa seyogyanya pimpinan harus memihak kepada kepuasan konsumen.

Transparansi dalam proses penyediaan KPR untuk anggota TNI AL perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan TNI AL karena bila dimensi ini dibiarkan terus menerus mendapat kriteria 'Buruk' maka akan memberikan dampak secara tidak langsung pada pembangunan moral dan jati diri prajurit di medan tugas.

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRACT

SRI PUDYORINI.

Principals Analysis Applying of Good Governance In Providing of KPR For TNI AL (Personel Case Study in Providing KPR In Satker Denma Mabelsal).

xv + 98 pages, 3 picture, 23 tables, 3 attachment

This thesis discuss principals applying analysis of good governance in Providing KPR for TNI AL Personel with case study of KPR in Satker Denma Mabelsal. This research is Purposed to reveal the applying of Good Governance principals in Providing KPR for TNI AL Personel, to know obstacles faced in principals applying of Good Governance in Providing of KPR for TNI AL Personel, and to find ways what should be done or conducted to overcome the problems. The care of the problem in this research in providing KPR for the TNI AL Personel assumed less optimal which dimensions of Good Governance tends not to be applied and seems like secluded, so that the providing function KPR for the TNI AL Personel isn't optimal yet tht means KPR Providing isn't transparant, accountable and responsive.

To analyse the problem, this research use analysis descriptive method through approach of quantitative and qualitative study. Meanuhile data collecting is conduted through direct perception and interview, supported with data from propogated result inquiry which is sprended in level according to rank faction and disseminating location of KPR. This thesis discuss principals applying analysis of good governance in Providing KPR for TNI AL Personel with case study of KPR in Satker Denma Mabelsal. This research is Purposed to reveal the applying of Good Governance principals in Providing KPR for TNI AL Personel, to know obstacles faced in principals applying of Good Governance in Providing of KPR for TNI AL Personel, and to find ways what should be done or conducted to overcome the problems. The care of the problem in this research in providing KPR for the TNI AL Personel assumed less optimal which dimensions of Good Governance tends not to be applied and seems like secluded, so that the providing function KPR for the TNI AL Personel isn't optimal yet tht means KPR Providing isn't transparant, accountable and responsive.

Result of the research indicate that applying of dimensions of Good Governance in Providing KPR is optimal enough with average score result of inquiry of responder answer equal to 3,37 or have criterion ' Eduquate'. Meanuhile the detail of responder interpretation score of each dimension is as following : Transparency equal to 2,59 (Bad), Akuntabilitas equal to 3,97 (Good), Justice equal to 3,46 (Good) and of Responsivitas equal to 3,47 (Good). There is indication [on] dimension ' transparency ' Which is interpreted ' bad' because very lack of two way communications of information and aspiration. This is assumed with the existence of information by almost 90 % ,which can be obtained; on the other hand, the real effort in the member participation to involve in Development Planning Process is ' 'zerol'.

First assumption which is raised by the writer is, the providing of KPR for TNI AL Personel , It is carried out by fulfilling transparency elements, accountability, responsive and fair nest which can be accepted'. Second assumption is providing of KPR for TNI AL Personels is optimal. If Praichding of KPR is carried out to fulfill transparency elements, akuntablitas, responsive and fair and also fulfill expectation of member accepting KPR it 'can be accepted'.

The direct obstacle in communications which is one way and indirect obstacle such as stiff relation or between superior with subordinate, altogether are descended from the existences of organization which Provide KPR TNI AL. This is kind of military organization which tend to be 'restricted' in the process of providing KPR TNI AL.

Effort toward transparency and bring up complex services seems like presence of 'good faith' such as media 'evaluation and suggestion' through letter and SMS. On the basis of the research result, it is suggested that leader properly have to be on the side of consumer satisfaction. Transparency in the process providing KPR for TNI AL personnels needs to be concerned by leader of TNI AL because if/ this dimension is kept continuously getting 'Bad' designation, it will result indirectly to development of soldiers morality in the tour of duty.

UNIVERSITAS TERBUKA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis yang berjudul **Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Penyediaan KPR Bagi Anggota TNI AL (Studi Kasus Penyediaan KPR Di Satker Denma Mabesal)**.

Dalam kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. DR. Eko Prosojo, Mag. Rer. Publ. Selaku Pembimbing I
2. Yth. Ibu DR. Suciati, M.Sc. Selaku Pembimbing II yang telah begitu sangat antusias dan sabar memberikan bimbingan kepada saya.
3. Kepala Dinas Perawatan Personil beserta staf, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tesis ini;
4. Rekan-rekan mahasiswa/i Program Magister Bidang kajian utama Ilmu Administrasi Publik yang telah banyak memberikan semangat dan dedikasi kepada penulis, sehingga terwujudnya Tesis ini;
5. Suami dan Putra-Putri tercinta yang dengan setia dan penuh kesabaran serta ketabahan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Program Magister;
6. Kakak/Adik-adik yang tiada hentinya memberikan dukungan dalam menyelesaikan Program Magister;

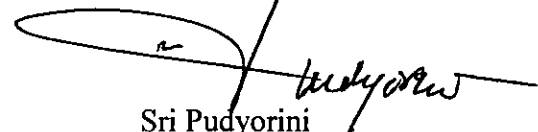
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi Program Magister di Universitas Terbuka.
8. Demikian pula kepada kepada rekan-rekan yang telah banyak mendorong baik moril maupun materiil sehingga terwujudnya *hasil penelitian* ini, saya ucapkan terima kasih.

Saya merasa bahwa hasil penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan saya dalam menganalisa maupun pada proses penyerapannya. Oleh karenanya saya sangat berterima kasih apabila ada koreksi perubahan demi sempurnanya *hasil penelitian* ini.

Atas perhatian dari berbagai pihak saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, September 2007

Peneliti



Sri Pudyorini
014287633

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

		Halaman
ABSTRAK		iii
ABSTRACT		v
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TABEL		xi
DAFTAR GAMBAR		xiii
DAFTAR LAMPIRAN		xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Pokok Permasalahan.....	4
	C. Perumusan Masalah Penelitian	5
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	7
	A. Proses Administrasi Publik.....	7
	B. Hubungan Administrasi Publik dengan Kebijakan Publik	9
	C. Pentingnya Kebijakan Publik Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi.....	11
	D. Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam Kebijakan Publik	15
	E. Hubungan <i>Good Governance</i> Dengan Kepuasan Pelanggan ...	24
	F. Kerangka Analisis.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN	36
	A. Definisi Konsep.....	36
	B. Tipe Penelitian.....	36
	C. Pendekatan Penelitian	37
	D. Asumsi.....	37
	E. Populasi dan Sampel Penelitian	37
	1. Populasi.....	37
	2. Sampel Penelitian.....	39
	F. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
	1. Metode Pengumpulan Data.....	41
	2. Metode Pengolahan Data.....	43
	G. Teknik Analisis Data.....	44
	H. Lokasi Penelitian.....	44
BAB IV	PEMBAHASAN	46
	A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	46

1.	Kondisi Umum	46
2.	Struktur Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut	47
3.	Struktur Organisasi Dinas Perawatan Personel (Diswatpersal) Dan Profil Debitur Serta Proses Administrasi Penyediaan KPR Untuk Anggota TNI AL Di Lingkungan Satker Denmabesal.....	50
B	Analisa <i>Kuantitatif</i> Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyediaan KPR Bagi Anggota TNI AL ..	61
1.	Dimensi Transparansi	61
2.	Dimensi Akuntabilitas	68
3.	Dimensi Keadilan	71
4.	Dimensi Responsivitas	74
C	Analisa <i>Kualitatif</i> Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyediaan KPR Bagi Anggota TNI AL..	78
1.	Dimensi Transparansi	78
2.	Dimensi Akuntabilitas	80
3.	Dimensi Keadilan	82
4.	Dimensi Responsivitas	83
D	Analisa Hasil Penelitian	84
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
A	Kesimpulan	87
B	Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA.....	90
	LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL-1.1	Daftar Lokasi Hunian KPR Anggota Satker Denma Mabel Di Wilayah Jabotabek	3
TABEL-2.1	Variabel, Dimensi, Indikator, Sumber Data, dan Item.....	35
TABEL-3.1	Jumlah Populasi Anggota TNI AL Yang Mendapat KPR....	38
TABEL-3.2	Jumlah Sampel Penelitian	40
TABEL-4.1	Tanggapan Responden Tentang Transparansi (Adanya Manajemen Terbuka) Berupa Informasi Rencana Pembangunan Perumahan Untuk Anggota.....	62
TABEL-4.2	Tanggapan Responden Tentang Transparansi (Adanya Manajemen Terbuka) Berupa Partisipasi Dalam Perencanaan Penyediaan Perumahan Untuk Anggota	63
TABEL-4.3	Tanggapan Responden Tentang Transparansi (Adanya Manajemen Terbuka) Berupa Pilihan Alternatif Dalam Menentukan Lokasi Perumahan	64
TABEL-4.4	Tanggapan Responden Tentang Transparansi (Ada Komunikasi Dua Arah Dalam Informasi Dan Aspirasi) Berupa Penyediaan Kotak Saran Atau Aspirasi Bagi Anggota Dalam Rangka Penyediaan Perumahan	65
TABEL-4.5	Tanggapan Responden Tentang Transparansi (Standar Perencanaan Yang Jelas, Terbuka Dan Aspiratif) Berupa Kesempatan Untuk Melihat Atau Peninjauan Lapangan (Lokasi) Terhadap Perumahan Contoh Yang Akan Dibangun ..	66
TABEL-4.6	Tanggapan Responden Tentang Transparansi (Standar Perencanaan Yang Jelas, Terbuka Dan Aspiratif) Berupa Informasi Atau Rumah Contoh Untuk Standarisasi Pembangunan Perumahan	66
TABEL-4.7	Tanggapan Responden Tentang Transparansi (Proses Penyediaan KPR Yang Aspiratif Dan Terbuka) Berupa Monitoring Proses Penyediaan KPR Oleh Semua Anggota .	67
TABEL-4.8	Rekapitulasi Interpretasi Responden Dimensi Transparansi.	68
TABEL-4.9	Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas	69

	(Pertanggungjawaban Yang Terbuka) Berupa Wujud Fisik Rumah (KPR) Sesuai Dengan Usulan Atau Aspirasi Yang Disampaikan	
TABEL-4.10	Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas (Pertanggung Jawaban Yang Terbuka) Berupa Rumah (KPR) Memiliki Kondisi Fisik Sesuai Dengan Rencana Semula	70
TABEL-4.11	Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas (Pola pengendalian proses Penyediaan Yang Terukur dan terkendali) Berupa Pertanggungjawaban Penyediaan Perumahan Dapat Diterima	71
TABEL-4.12	Rekapitulasi Interpretasi Responden Dimensi Akuntabilitas	71
TABEL-4.13	Tanggapan Responden Tentang Keadilan (Perlakuan Yang Adil Pada Semua Unsur) Berupa Keadilan Pelayanan Dalam Mengurus Atau Mendapatkan KPR	73
TABEL-4.14	Tanggapan Responden Tentang Keadilan (Kesetaraan Dalam Proses Kemitraan Dan Hubungan Kerja Serta Dalam Memberikan Pelayanan) Berupa Perlakuan Sebagai Mitra Sekaligus Pelanggan Dalam Mengurus Administrasi Untuk Mendapatkan KPR.....	73
TABEL-4.15	Rekapitulasi Interpretasi Responden Dimensi Keadilan.....	74
TABEL-4.16	Tanggapan Responden Tentang Responsivitas (Kepekaan Terhadap Setiap Persoalan Yang Muncul) Berupa Pelayanan Yang Cepat, Mudah, Murah Dan Baik Bagi Para Anggota Yang Membutuhkan Informasi Dan Proses Administrasi	75
TABEL-4.17	Tanggapan Responden Tentang Responsivitas (Tanggap Terhadap Semua Partisipasi dan Aspirasi) Berupa Cepat Tanggap Dan Bekerja Keras Dalam Mewadahi Aspirasi Para Anggota Yang Membutuhkan KPR	76
TABEL-4.18	Rekapitulasi Penafsiran Responden Dimensi Responsivitas	77
TABEL-4.19	Rekapitulasi Penafsiran Responden Variabel Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyediaan KPR.	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR-2.1 Kerangka Konseptual	34
GAMBAR-4.1 Struktur Organisasi Diswapersal	51
GAMBAR-4.2 Skema Pengajuan KPR Oleh Anggota	53

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN-01 Angket Penelitian	91
LAMPIRAN-02 Daftar Pertanyaan Dan Hasil Wawancara.	95
LAMPIRAN-03 Tabel-AA Nilai Jawaban Responden Aspek Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance	98

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk terutama di daerah perkotaan, maka kebutuhan akan lahan terutama untuk perumahan semakin meningkat. Selain lahan untuk perumahan semakin sempit juga semakin meningkatnya harga lahan yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Akibatnya, penyediaan rumah hunian telah menjadi barang komoditi yang cukup penting di daerah-daerah perkotaan terutama kota-kota besar yang sudah menjadi tujuan bisnis dan investasi seperti wilayah Jabotabek dan sekitarnya.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan sekaligus indikator kesejahteraan rakyat dalam meningkatkan eksistensi kehidupannya. Bahkan rumah dapat digunakan sebagai alat perdagangan yang memiliki nilai tukar yang cukup ekonomis dan fleksibel, sehingga menjadi pemicu semakin banyaknya muncul industri perumahan yang kadang-kadang mengabaikan keseimbangan tata ruang dan tata guna tanah sekitarnya. Akibatnya selain keseimbangan ekosistem terganggu juga sanitasi kesehatan lingkungan kehidupan bagi para penghuninya semakin memburuk dan tidak layak huni.

Untuk mendapatkan suatu perumahan yang layak bagi penduduk sekitar Ibu kota DKI Jakarta semakin hari semakin sulit didapatkan terutama yang jarak tempuh menuju Ibu Kota DKI Jakarta relatif dekat. Sedangkan yang sekarang cenderung berkembang adalah hunian perumahan yang cenderung semakin jauh dari pusat Ibu Kota DKI Jakarta dan bahkan berada di wilayah-wilayah pinggiran Ibu Kota yang cenderung memerlukan waktu relatif lama dan jarak tempuh yang cukup jauh menuju tempat bertugas atau bekerja di wilayah DKI Jakarta.

Komuniti anggota TNI dalam hal ini TNI AL khususnya dalam memenuhi kebutuhan perumahan untuk anggota secara ideal dikaitkan dengan fungsi dan tugas serta kewajibannya sebagai alat Negara yang setiap saat harus siap dan siaga dalam menjaga keutuhan bangsa dan NKRI, maka idealnya haruslah dekat dengan lembaga institusinya agar setiap saat bisa dengan cepat dan sigap mudah digerakan dan dimobilisasi untuk menjaga dan mengawal keutuhan bangsa dan NKRI. Tetapi kenyataannya terutama di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta secara *de facto* adalah sangat sulit untuk didapatkan. Keberadaan rumah hunian para prajurit jauh dari pusat unit istansinya, dan untuk mencapai tempat bekerja mereka sering terhambat oleh kemacetan lalu-lintas.

Keluhan-keluhan yang penulis peroleh baik dari para penghuni maupun dari para pejabat institusi TNI AL pada umumnya menyatakan bahwa seringkali aktivitas kedinasan terlambat dan terganggu karena alasan faktor hunian para prajurit yang sangat jauh dari pusat institusi. Beberapa perbandingan lokasi hunian KPR yang dihuni oleh para anggota Satker Mabes TNI AL (Prajurit TNI AL) yang ada disekitar Jabotabek dapat dilihat pada Tabel-1.1.

Tabel-01

**DAFTAR LOKASI HUNIAN KPR ANGGOTA SATKER DENMA MABESAL
DI WILAYAH JABOTABEK**

NO	WILAYAH	LOKASI HUNIAN KPR	JARAK TEMPUH KE PUSAT INSTITUSI (CILANGKAP)	WAKTU TEMPUH
1	Bogor	Jonggol	25 Km	60 Menit
2	Bekasi	Jati Asih	23 Km	40 Menit
3	Depok	Depok I	30 Km	60 Menit
4	Tangerang	Ciledug	35 Km	90 Menit
5	Jakarta	Nihil	-	-

Sumber : Ditwatpersal, 2006.

Kondisi kemacetan lalu-lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya sulit untuk diprediksi, sehingga waktu pemberangkatan Bis angkutan untuk anggota harus dilakukan sesuai waktu tempuh dari waktu tiba menjelang apel pagi pukul 06.40, akibatnya sering kali banyak anggota satker Denma Mabasal yang tertinggal Bis (*Lyn*).

Selain masalah jarak tempuh hunian KPR yang relatif cukup jauh juga kondisi fisik KPR yang diterima anggota Satker Denma Mabasal dalam waktu dua tahun sudah rusak, terutama pada bagian dinding dan tiang penyangga betonan menjadi retak-retak dan bahkan ambruk atau mengelupas dari konstruksi besinya. Demikian juga kondisi Air sumur Bor menjadi keruh manakala hujan turun dan saluran pembuangan air kadang tersumbat karena endapan yang tinggi, ditambah banyaknya tembok saluran pembuangan air sudah hancur sehingga genangan air dan sanitasi menjadi buruk serta menjadi tidak sehat.

Terpenuhinya kebutuhan hunian melalui KPR tetapi dengan perkembangan kondisi yang buruk telah menyebabkan anggota yang berhak untuk menghuni balik kembali menghuni Rumah Dinas TNI AL, dan bahkan banyak yang tidak mau menyerahkan Rumah Dinasnya kepada institusi TNI AL. Lebih ironisnya lagi muncul aspirasi dari para anggota TNI AL menyampaikan kepada Pimpinan TNI AL untuk membeli Rumah Dinas TNI AL yang dikuasainya dengan cara dicicil dengan alasan diantaranya hunian KPR yang diterima tidak layak huni.

Pemenuhan penyediaan KPR bagi prajurit TNI AL merupakan kebijakan para pemimpin TNI AL dalam rangka program pembinaan personel berupa program perawatan personel sehingga diharapkan para anggota TNI AL dapat memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan Negara. Oleh karenanya dengan keadaan dan kondisi penyediaan KPR yang kurang memadai seperti telah penulis sampaikan di

KPR yang terkesan kurang sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga penyediaan KPR tidak mampu menggambarkan suatu hasil dari adanya proses yang *transparent, accountable dan responsive*, dan pada akhirnya cenderung akan memacu pada pembinaan personel yang menjadi kurang efektif dan menjadi lemah.

C. Perumusan Masalah Penelitian.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL diselenggarakan ?.
- b. Apa hambatan-hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL ?.
- c. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Dapat mengungkapkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL

- c. Untuk mencari usaha-usaha apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

- a. Teoritis :

Pengembangan teori administrasi publik dan penyelenggaraan administrasi publik.

- b. Praktis :

Nilai guna implementasi teori administrasi publik di bidang penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL serta bagaimana sebaiknya penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyediaan KPR dapat terus dikembangkan dan diselenggarakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Proses Administrasi Publik.

Penyelenggaraan administrasi publik hendaknya dapat diselenggarakan dengan baik sehingga dapat memberikan kepuasan kepada publik yang dilayaninya. Oleh karenanya kepuasan publik sebagai tujuan akhir yang harus diraih dalam proses penyelenggaraan negara dapat dilaksanakan dan didedikasikan untuk pencapaian kepentingan publik. Demikian pula nilai-nilai instrinsik yang melekat sebagai perwujudan dari kepentingan publik merupakan sumber daya utama dalam pengelolaan pencapaian tujuan organisasi publik. Hal ini semua menjadi perhatian dari para penyelenggara negara dalam pengelolaan organisasi publik terutama dalam proses formulasi kebijakan publik yang dirumuskannya.

Pada sisi lain Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro² yang dikutip oleh Inu Kencana menyebutkan bahwa administrasi publik merupakan bagian dari proses politik dalam merumuskan suatu kebijaksanaan dan juga dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya bahwa administrasi publik merupakan suatu keseluruhan implementasi kebijakan publik yang diselenggarakan oleh suatu organisasi publik dalam rangka upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi publik tersebut khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Dengan kata lain pelayanan publik harus dilakukan guna mencapai tujuan organisasi publik. Pengertian tersebut melahirkan adanya kewajiban kepada aparatur pemerintah untuk melayani semua warga negara dengan perlakuan yang sama.

Dengan tujuan seperti yang disebutkan di atas agar fungsi pelayanan yang diberikan tersebut memberikan efek formal, maka tujuan yang harus dilaksanakan

²) Inu Kencana, *Pengantar Administrasi Publik* (Jakarta : Rineka Cipta, Cet. Pertama, 1999) hal. 19

tersebut seyogyanya harus mendapat keputusan politis dari lembaga legislatif. Pada kenyataannya dengan semakin tingginya aktivitas pelayanan oleh pemerintah kepada rakyatnya, maka akan cenderung mengakibatkan matinya partisipasi rakyat, hal ini tentunya sangat tidak diharapkan terjadi. Oleh karenanya koridor penyelenggaraan fungsi administrasi seyogyanya harus merupakan keputusan politis, yang mampu menjaga serta mengusahakan agar partisipasi demokrasi tidak menjadi mati.

Woodrow Wilson sangat mengkhawatirkan adanya kondisi demikian terutama pada tindakan kesewenang-wenangan pemerintah untuk menciptakan kepatuhan kepada rakyatnya dalam rangka memberikan pengaturan dan pelayanan publik, apalagi bahwa tindakan atau pelayanan publik tersebut dilandasi oleh adanya suatu keputusan politis³. Oleh karena itu Wilson menginginkan adanya pemisahan yang tegas antara administrasi dan politis. Dengan adanya penemuan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen serta teknologi administrasi yang dapat diterapkan dalam melaksanakan fungsi pelayanan umum, maka pertumbuhan fungsi pelayanan baik oleh Negara maupun oleh lembaga pelayanan sosial terus semakin ditumbuhkan dan bersifat profesional. Dengan demikian akhirnya Ilmu Administrasi Negara yang konvensional (klasik) harus mampu menjawab masalah-masalah kritis tentang bagaimana negara mampu menyediakan pelayanan yang lebih baik dengan sumber-sumber daya yang tersedia seefisien mungkin dan juga bagaimana Negara dapat mempertahankan tingkat pelayanan yang optimal dengan biaya sehemat mungkin.

Pembangunan organisasi pemerintahan yang baik perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang berpengetahuan disertai efisiensi yang tinggi dengan harapan mampu menciptakan kinerja organisasi yang optimal. Berkaitan dengan

³) Woodrow Wilson dalam Miftah Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara* (Jakarta : CV. Rajawali, Cet. Pertama Tahun 1984) hal. 45.

adanya upaya efisiensi seperti dikemukakan di atas, Stewart⁴ mengemukakan bahwa kegiatan organisasi pemerintah yang baik tidak cukup hanya memenuhi kriteria 2E (Efisiensi dan Efektivitas) saja, melainkan harus memenuhi kriteria 4E yang meliputi *Efisiensi, Efektivitas, Economic dan Equity (Keadilan)*. Dan lebih penting lagi adalah proses administrasi publik dapat terselenggara dengan baik melalui implementasi kebijakan publik yang dirumuskan dalam formulasi kebijakan yang dapat mewujudkan kriteria 4 E di atas.

B. Hubungan Administrasi Publik dengan Kebijakan Publik.

Seerti yang telah dikemukakan di muka bahwa pada dasarnya administrasi publik merupakan keseluruhan dari implementasi kebijakan publik yang diselenggarakan dalam suatu organisasi publik guna mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi publik. Untuk mengoptimalkan tujuan organisasi publik terutama dalam mengimplementasikan kebijakan publik, Hesel⁵ menawarkan 3 kriteria yang harus dimiliki dalam suatu kebijakan publik yaitu sebagai berikut : *Transparan, Rasional dan Partisipatif*. Sedangkan Nugroho⁶ khususnya dalam menyusun formulasi kebijakan publik hendaknya harus memiliki nilai-nilai sebagai berikut : *Akuntabilitas, Transparansi, Fairness atau keadilan; dan Responsivitas atau ketanggapan*. Hal ini berarti para penyelenggara negara dalam merumuskan suatu kebijakan harus menjwai apa yang disebutkan di atas, juga hal ini akan menjadi semakin penting manakala diorientasikan pada rakyat yang harus dilayani karena aspek-aspek tersebut selain dapat memberikan kepuasan dan keadilan sosial dalam proses penyelenggaraan administrasi publik, juga dapat menimbulkan kepercayaan

⁴) Stewart, T.A, *Reengineering The Hot New Managing Tool* (, Fortune Magazine, August 1993) p. 118.

⁵) Hessel Nogi. S, *Analisis Kebijakan Publik Kontemporer* (Yogyakarta : Lukman Offset, 2004) hal. iii

⁶) *Ibid.*, hal. 6.18

pemerintahan yang semakin transparan dan berpihak pada masyarakat. Demikian juga dengan adanya pemberian penghargaan pada nilai-nilai yang melekat pada manusia yang harus dilayaninya maka perhatian terhadap pelayanan publik menjadi bagian yang penting terutama dalam implementasi kebijakan publik yang rasional dan adil.

C. Pentingnya Kebijakan Publik Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi.

Siagian⁷ menyebutkan bahwa Administrasi Publik dapat didefinisikan sebagai “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”. Hal tersebut akan melahirkan suatu kewajiban kepada aparatur pemerintah untuk *melayani* semua warga negara dengan perlakuan yang sama, karena warga negara itu dimata hukum berkedudukan sama. Oleh karenanya kepada mereka harus diberikan pelayanan yang sama oleh aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Hal penting lainnya yang perlu digaris bawahi dari pengertian tersebut di atas adalah faktor tujuan yang ingin dicapai hendaklah semata-mata dalam rangka pencapaian *welfare state* dan *service*, mengingat sumber-sumber yang sangat terbatas pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain dimana terdapat tujuan negara yang relatif tidak terbatas.

Seiring dengan tujuan seperti yang diharapkan di atas dan merupakan hal penting harus dilaksanakan agar fungsi pelayanan yang diberikan tersebut memberikan efek formal, maka tujuan yang harus dilaksanakan tersebut seyogyanya merupakan kebijakan yang tepat.

⁷) Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta : Gunung Agung, Cet. Keduabelas, 1983) hal. 8

Pentingnya fungsi legalitas seperti apa yang dimaksudkan di atas juga diungkapkan oleh H.G. Frederickson⁸ dengan pertanyaan yang sangat mendasar : **“Bagaimanakah kita dapat membuat pemerintah menjadi kompeten dan otoritatif tanpa merusak nilai partisipasi demokratis dan nilai pertanggungjawaban ?”**. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi aktivitas pelayanan oleh pemerintah kepada rakyatnya maka akan cenderung mengakibatkan matinya partisipasi rakyat. Oleh karena itu fungsi administrasi seyogyanya merupakan keputusan politis, agar partisipasi demokratis tidak menjadi mati. Frederickson⁹ mengutip ucapan dari Woodrow Wilson yang mengatakan : **“Administrasi berada diluar ruang lingkup politik yang sebenarnya. Persoalan-persoalan administrasi bukanlah persoalan-persoalan politik; meskipun politik menetapkan tugas-tugas bagi administrasi, ia tidak boleh dibiarkan untuk memanipulasikan jabatan-jabatan administrasi.”**

Pendapat Woodrow Wilson tersebut lebih cenderung pada rasa kekhawatirannya pada tindakan kesewenang-wenangan pemerintah untuk menciptakan kepatuhan kepada rakyatnya¹⁰ dalam rangka memberikan pengaturan dan pelayanan publik, apalagi bahwa tindakan atau pelayanan publik tersebut dilandasi oleh adanya suatu keputusan politis. Oleh karena itu Wilson menginginkan adanya pemisahan yang tegas antara administrasi dan politis.

Selanjutnya Leonard White¹¹ berusaha untuk mengawinkan ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran tersebut di atas dimana guna menjaga kekhawatiran adanya tindakan yang semena-mena dalam fungsi pelayanan umum, maka penemuan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen serta

⁸) George Frederickson, *Administarsi Negara Baru* (Jakarta : LP3ES, Cet. Keempat. 1984)
hal. 1

⁹) *Ibid*

¹⁰) Miftah Toha, *op. cit.*, hal. 45

¹¹) George Frederickson, *op. cit.*, hal. 2

teknologi administrasi agar digunakan dalam fungsi pelayanan umum tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai upaya bagaimana mengawinkan ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi agar bisa memaksimalkan fungsi pelayanan umum yang efisien dan efektif¹². Adanya penemuan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen serta teknologi administrasi yang sangat memungkinkan untuk diterapkan dalam fungsi pelayanan umum, maka pertumbuhan fungsi pelayanan oleh Negara harus terus ditumbuh kembangkan dan bersifat *professional* serta *proporsional*.

Berdasarkan adanya dua ruang dimensi kepentingan dalam penyelenggaraan administrasi publik seperti dikemukakan di atas, maka hendaknya kebijakan yang diterapkan haruslah yang seimbang sehingga dapat memenuhi dua kepentingan baik kepentingan publik yang dilayani maupun kepentingan organisasi yang dapat berwujud tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Disamping untuk memperoleh keseimbangan orientasi dari dua kepentingan yang berbeda, juga dilakukan upaya bagaimana meningkatkan *keadilan sosial* pada setiap fungsi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat bahwa *nilai keadilan sosial mencakup pengertian seperangkat pilihan nilai, pilihan kerangka organisasi, dan pilihan corak manajemen. Selain itu juga keadilan sosial menekankan pada azas pertanggung jawaban atas keputusan-keputusan dan pelaksanaan program untuk manajer-manajer publik*. Oleh karenanya keadilan sosial menekankan pada adanya perubahan dalam manajemen publik, selain menekankan adanya daya tanggap *lebih* terhadap kebutuhan warga negara ketimbang terhadap kebutuhan-kebutuhan organisasi publik. Selain itu keadilan sosial menekankan suatu pendekatan terhadap studi mengenai administrasi negara dan pendidikan administrasi negara yang bersifat interdisipliner, terapan, dan memecahkan masalah, serta secara teoritis dikatakan sehat.

¹²) George Frederickson, *of. cit.*, hal. 94

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pentingnya pelayanan kepada publik ditengah-tengah upaya Negara melakukan efisiensi karena krisis energi, Barzelay¹³ mencoba menawarkan pemikiran baru setelah melihat roda birokrasi pemerintahan yang banyak melakukan kecurangan (korup) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu berupa paradigma *pascabirokrasi* yang intinya mengurangi sebanyak mungkin keterlibatan birokrasi di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diyakini oleh suatu keyakinan bahwa masyarakat yang maju sebagai suatu kesatuan diyakini akan mampu mengurus sebagian besar kepentingannya oleh anggota masyarakatnya itu sendiri.

Sejalan dengan pemikiran dari Barzelay tersebut maka terjadi perubahan besar pada manajemen pemerintahan didukung pula oleh konsep pemikiran dari Osborne dan Gaebler¹⁴ yang menawarkan perlunya transformasi semangat kewirausahaan pada sektor publik. Osborne dan Gaebler¹⁵ mengemukakan sepuluh pokok pikiran yang intinya adalah mengurangi peranan pemerintah dengan cara memberdayakan masyarakat serta menjadikan sektor pemerintah lebih efisien. Inti pemikiran Osborne dan Gaebler¹⁶ melalui *Reinventing Government* menunjukkan tiga isu penting yaitu :

- 1) Bagaimana mengembangkan berbagai alternatif organisasi dan manajerial yang semakin banyak memberikan kesempatan kepada masyarakat dan dunia swasta agar ikut berperan dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa.
- 2) Bagaimana mengembangkan administrasi keuangan dan anggaran yang berorientasi pada misi dan visi organisasi (*Budgeting Reform*).

¹³) M. Barzelay and B. Armajani, *Breaking Trough Bureaucracy A New Vision For Managing Government*, (Berkeley: University Of California Press, 1992) p. 97

¹⁴) David Osborne & T. Gaebler, *Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*, (New York: Phime, 1993) p. 138.

¹⁵) *Ibid.*, p. 141

¹⁶) *Ibid.*, p. 198

- 3) Bagaimana membangun organisasi dan suatu manajemen publik yang berorientasi pada permintaan dan kepuasan customer.

Berdasarkan perubahan paradigma pemerintah tersebut di atas maka pemerintah atau negara akan beranjak dari paradigma yang: (1) Berskala birokratis ke asas yang berskala “problem solving”; (2) Lebih menyerupai jaringan keseimbangan sebuah mesin; (3) Lebih banyak memberi komando dan menjadi inovator. Dengan harapan tercipta adanya keseimbangan sinergisme dan spirit pemberdayaan organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Alexander Hamilton¹⁷ menyebutnya sebagai “energi dalam eksekutif”; artinya bahwa administrasi publik tidak hanya menyelenggarakan mandat legislatif se-efisien dan se-ekonomis mungkin, melainkan juga untuk mempengaruhi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang secara lebih umum meningkatkan kualitas kehidupan bagi semuanya. Transparansi dalam kehidupan administrasi merupakan kebutuhan pokok dalam membangun kebijakan yang lebih baik dimasa mendatang.

D. Penerapan *Good Governance* Dalam Kebijakan Publik.

Sudah semestinya bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi apapun yang menyangkut fungsi pemberian pelayanan yang baik untuk warga negaranya (public), maka kunci keberhasilannya terletak pada seberapa baik kebijakan publik yang dilakukannya dapat memberikan kepemihakan kepada pihak yang dilayaninya (*stakeholder*). Tersedianya *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh warga negaranya seyogyanya disertai dengan terselenggaranya *good governance* yang disertai dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat

¹⁷) George Frederickson, *op. cit.*, hal. 28

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Kebijakan publik yang bertanggung jawab sudah semestinya terkendali atau dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang memiliki kewenangan. Oleh karenanya dapatlah dikatakan bahwa instansi pemerintah hendaknya mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari misi instansi yang dipimpinnya. Artinya bahwa sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Penerapan *good governance* dalam suatu kebijakan publik, bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah. Kondisi dari pelaku-pelaku dalam masyarakat juga harus mendapat perhatian. Masyarakat itu sendiri sebagai institusi juga memiliki berbagai macam kelompok sosial dengan kondisi dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, *good governance* membutuhkan suatu cara agar keragaman itu diperhitungkan. Beberapa kelompok atau institusi tertentu, misalnya mungkin dapat berfungsi sebagai *intermediary institutions/organizations* untuk mewakili masyarakat akar rumput yang beragam.

Mengingat bahwa pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (*public service*). Pemerintahan yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Sebaliknya, pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak akan dapat terselenggara dengan baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran paradigma dari paradigma *rule government* menjadi *good governance*. Dalam paradigma *rule government* penyelenggaraan pemerintahan,

terjadi pergeseran paradigma dari paradigma *rule governance* menjadi *good governance*. Dalam paradigma *rule governance* penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik senantiasa menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara (*state*) semata, tetapi harus melibatkan internal birokrasi maupun eksternal birokrasi. Disamping itu, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik mengandung pengertian ketentuan-ketentuan yang bersifat fundamental (mendasar) yang telah teruji kebenarannya dalam praktek, sehingga dapat dijadikan pedoman pemikiran atau tindakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Sektor negara sebagai salah satu komponen pemerintahan yang baik, terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggaraan kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan menjadi domain yang terpenting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Eksekutif (pemerintah) dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, antara lain dalam rangka menjadikan kesetaraan antara negara dan masyarakat. Kesetaraan inilah yang memfasilitasi terbentuknya *civil society* (masyarakat madani).

UNDP¹⁸ dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan LAN menegaskan prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut :

1. Partisipasi: setiap warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili

¹⁸) LAN, *Modul : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Jakarta : LAN, 2004) hal. 22

kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berorganisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Taat hukum (*rule of law*): kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk hak asasi manusia.
3. Transparansi : dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dipantau.
4. Responsif : Lembaga-lembaga negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani stakeholdersnya. Responsif terhadap aspirasi masyarakat, atau kliennya.
5. Beroentasi kesepakatan (*consensus orientation*): good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur kerja.
6. Kesetaraan (*equity*): semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektif dan efisien : proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia hasilnya sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (*accountability*): para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.

Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. Visi Strategik (*strategic vision*): para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan sumber daya manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

BUILD¹⁹ dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan LAN mengemukakan 10 (sepuluh) prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain:

1. Partisipasi : mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tak langsung.
2. Penegakan hukum: mewujudkan adanya hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Transparansi : menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Kesetaraan : memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

¹⁹)*Ibid.*, hal. 23

maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Disamping itu, akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang mencakup baik perilaku bersifat pribadi dan disebut dengan akuntabilitas spiritual, maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan orang sekeliling.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,
- (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
- (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh,
- (5) Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

harus dipenuhi dengan satu harapan demi terwujudnya kepuasan pelanggan dari yang dilayaninya yaitu masyarakat.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen, serta tersedianya akses yang sama akan informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian secara efisien dan efektif. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (*controllable activities*). Kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan – kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berkewenangan.

Guna mewujudkan penyelenggaraan administrasi publik yang terkendali seperti yang telah disebutkan di atas, maka akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Koentjaraningrat²² dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan LAN menyebutkan bahwa bangsa Indonesia memiliki beberapa mentalitet negatif yang tidak mendukung pembangunan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang modern, termasuk pembangunan aparatur negara, antara lain : mentalitet “menerabas” (“potong kompas”), dan mentalitet “merendahkan mutu”. Hal inilah yang menuntut perlunya penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara benar dan konsisten dengan satu harapan yaitu dapat memunculkan budaya kerja, peningkatan kinerja (kualitas dan kuantitas), serta orientasi kerja berdasarkan manajemen. Disamping itu, diharapkan pula timbulnya budaya organisasi yang positif, antara lain berupa nilai-nilai yang berorientasi pada peningkatan mutu, peningkatan kinerja, dan penerapan nilai-nilai transparansi dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* ini di lingkungan aparatur negara nantinya akan dapat mendukung pula pengembangan nilai-nilai budaya positif di lingkungan masyarakat pada umumnya.

Secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman : (1) Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian,

²²)*Ibid.*, hal. 45

pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; dan (2) aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini berarti pemerintahan yang baik tergantung pada dua hal : (1) Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara; Orientasi ideal negara mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan komponen-komponen konstituen atau pemilihannya seperti : legitimacy, apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya; accountability atau akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban . Seberapa jauh perlindungan hak-hak asasi manusia terjamin, adanya otonomi dan devolusi kekuasaan kepada daerah, serta adanya jaminan berlangsungnya mekanisme kontrol oleh masyarakat secara efektif. (2) Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan bernegara. Hal ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Dalam membangun *good governance*, bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah namun perlu adanya perhatian terhadap pelaku-pelaku dalam masyarakat yang berasal dari berbagai macam kelompok sosial dengan kondisi dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, melalui *good governance* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dari berbagai keragaman dengan kondisi dan kepentingan yang beragam pula.

Keterkaitan antara unsur-unsur pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan Negara, sebagaimana dikemukakan oleh UNDP²³ dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan LAN, *Governance* digambarkan dengan tiga kaki, yaitu: (1) *Economic governance*, meliputi proses-proses pembuatan keputusan (*decision-making processes*) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Penyelenggara ekonomi yang dimaksud disini adalah legislatif sebagai pengambil keputusan politik, pemerintah disamping pelaksana (BUMN/D) juga sebagai fasilitator terhadap pihak swasta/masyarakat sebagai pelaku ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap *equity, poverty, and quality of life*; (2) *Political governance* merupakan proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Aktivitas ini merupakan fungsi legislatif suatu kebijakan tertentu (Peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh badan *legislative* (pengujian material) dari peraturan perundang-undangan; (3) *administrative governance* adalah suatu sistem implementasi kebijakan.

Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu : *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan aktif dan positif dalam interaksi sosial melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

Pada hakikatnya, penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (*public service*). Pemerintahan yang baik cenderung

²³) *Ibid.*, hal. 17

keuangan (neraca laba rugi, pelaksanaan anggaran), dan akuntabilitas hukum (peraturan-peraturan disiplin, UU anti korupsi). Sedangkan akuntabilitas birokrasi publik adalah kepada pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui lembaga-lembaga perwakilan, dan akuntabilitas perusahaan kepada shareholders (pemegang saham) maupun stakeholders (pemegang kepentingan).

- b. *Transparency* (transparansi), yaitu, dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan mengenai perumusan kebijakan (politik) dari : pemerintah, organisasi, maupun badan usaha. Good governance tidak membolehkan cara-cara manajemen tertutup.
- c. *Openess* (keterbukaan), yaitu pemberian informasi secara terbuka, untuk open free suggestion, dan terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk perbaikan. Keterbukaan dapat meliputi : bidang politik (proses politik), ekonomi (kebijakan dan transaksi transaksi ekonomi) dan pemerintahan (perumusan kebijakan, pengangkatan dalam jabatan), kekayaan pejabat, pimpinan perusahaan dapat dilihat sebagai dijalankannya keterbukaan. Prinsip keterbukaan juga mendorong dilakukannya dialog.
- d. *Rule of law* (aturan hukum), yaitu keputusan dan kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat dan pihak ketiga, dilakukan berdasarkan hukum (peraturan yang sah). Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap kebijakan publik yang di tempuh, juga dalam social economic transactions. Penyelesaian konflik (conflict resolutioin) berdasar hukum (termasuk arbitrase) memang boleh pada hal tertentu suatu “ out of court settlement” tapi itupun sebaiknya

harus berdasar hukum. Institusi hukum yang bebas, dan kinerjanya yang terhormat (*a respected independent judiciary*) penting dalam pemerintahan yang baik. Dasar-dasar dan Institusi hukum yang baik. Dasar-dasar dan institusi hukum yang baik sebagai infrastruktur pemerintahan yang baik.

- e. *Fairness* (jaminan keadilan), *A level of playing field* (perlakuan yang adil/kesetaraan) ini berlaku bagi pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan publik, perusahaan kepada pelanggan, dan lain sebagainya.

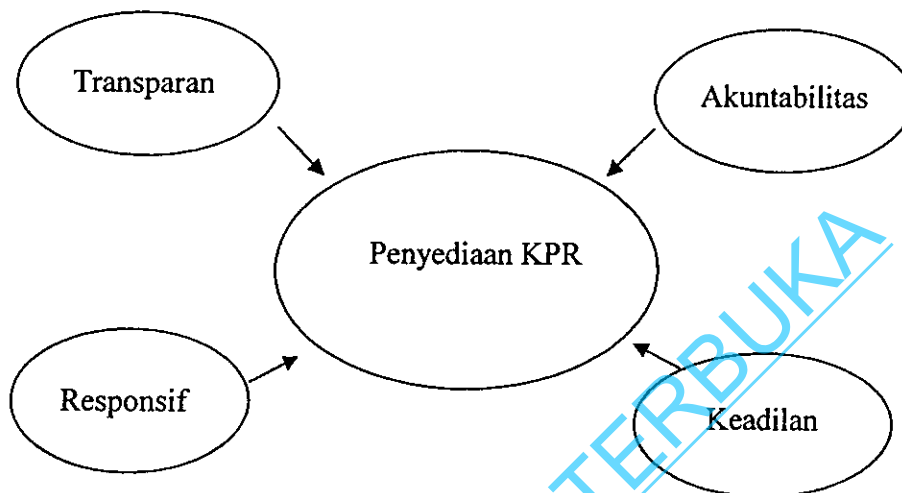
Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dimaksud pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan rasional, bila diterapkan dengan baik dapat menjadi tolok ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik pemerintahan yang baik. Kata prinsip mempunyai makna yang sama dengan asas, karena asas pada hakekatnya merupakan awal dari kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak.

Prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diuraikan diatas dapat kita kembangkan, dan dipraktekkan dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam bernegara. Proses pencapaian tujuan negara yang melibatkan pemerintah dan masyarakat berlangsung melalui sistem administrasi negara. Dengan aplikasi prinsip-prinsip *good governance* dalam fungsi-fungsi pemerintahan, maka penyelenggaraan negara akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Wujud pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan mensinergikan interaksi yang konstruktif diantara pemerintah negara, sektor swasta

Pada gambar-2.1 di bawah ini terdapat empat variabel yaitu : Tranparansi, Akuntabilitas, Keadilan dan Responsivitas; yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan KPR untuk anggota TNI AL .

Gambar – 2.1
Kerangka Konseptual



Sedangkan untuk menjabarkan penelitian, perlu dilakukan operasionalisasi kedalam indikator-indikator agar dapat diteliti dan dianalisis, seperti tampak pada Tabel-2.1 .

Tabel-2.1
Variabel, Dimensi, Indikator, Sumber Data dan Item

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SUMBER DATA	ITEM
Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Penyediaan KPR	1. Transparan.	-Adanya manajemen terbuka	Primer	1,2,3
		-Ada komunikasi dua arah dalam informasi dan aspirasi.	Primer	4
		-Standar perencanaan yang jelas, terbuka dan aspiratif.	Primer	5,6
		-Proses penyediaan KPR yang aspiratif dan terbuka.	Primer	7
	2. Akuntabilitas.	-Pertanggungjawaban yang terbuka.	Primer	8,9
		-Pola pengendalian proses penyediaan yang terukur dan terkendali.	Primer	10
	3. Keadilan	-Perlakuan yang adil pada semua unsur.	Primer	11
		-Kesetaraan dalam proses kemitraan dan hubungan kerja serta dalam memberikan pelayanan.	Primer	12
	4. Responsivitas	-Kepekaan terhadap setiap persoalan yang muncul	Primer	13
		-Tanggap terhadap semua partisipasi dan aspirasi.	Primer	14

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Definisi Konsep.

Adapun definisi konsep dari variabel yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah Penyediaan KPR dengan definisi konstitutif sebagai suatu kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk suatu keputusan-keputusan pimpinan dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL; sedangkan indikator sub-variabelnya adalah 'prinsip-prinsip good governance' seperti yang dikemukakan oleh Nugroho²⁶ dalam Kismartini (2005:6.18), yaitu terdiri dari : Transparansi, Akuntabilitas, Keadilan dan Responsivitas.

B. Tipe Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian yang disebut dengan tipe penelitian 'Deskriptif Analitis' yaitu metode penelitian yang bersifat menggambarkan bagaimana proses dari obyek yang diamati dan diteliti sehingga diperoleh suatu hasil penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu proses atau aktivitas yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penyediaan KPR bagi anggota TNI AL dapat dilaksanakan khususnya pada Satuan Kerja (Satker Denma Mabel).

Pendeskripsian dari variable-variabel *good governance* dalam proses penyediaan KPR serta bagaimana interaksinya dengan berbagai pihak akan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

²⁶) Nugroho dalam Kismartini, dkk., *op. cit.*, 6.18

C. Pendekatan Penelitian.

Guna mendukung penelitian yang dilakukan, maka peneliti menggunakan pendekatan *kualitatif* yang disusun dalam bentuk *kuantitatif*, sehingga data yang diperoleh adalah data *interval* (bergradasi) dengan teknik pengumpulan data melalui *survei* (angket). Artinya, data yang telah terjaring melalui angket dalam bentuk data interval selanjutnya dihitung rata-ratanya untuk selanjutnya dilakukan penaksiran secara kualitatif.

D. Asumsi.

Seiring dengan pendeskripsian operasionalisasi variable-variabel yang diteliti dan diukur serta digambarkan seperti telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis menggunakan asumsi sebagai landasan pikir dalam melakukan penelitian di lapangan yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan KPR untuk anggota TNI AL diselenggarakan dengan memenuhi unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsif.
2. Penyediaan KPR untuk anggota TNI AL dapat terselenggara dengan optimal, apabila penyediaan KPR selain memenuhi unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsif juga dapat memenuhi harapan anggota yang menerima KPR.

E. Populasi dan Sampel Penelitian.

1. Populasi.

Populasi²⁷ adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung maupun mengukur, kuantitatif maupun kualitatif, dari

²⁷)Sujana, *Metoda Sataistika* (Jakarta : Jembatan Tiga, 1989) hal. 26

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan obyek yang lengkap dan jelas. Populasi²⁸ pada hakekatnya tidak saja menunjuk pada sejumlah individu yang berwujud manusia, akan tetapi sejumlah binatang, tumbuhan, barang-barang, sifat, golongan dan sebagainya.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah semua anggota TNI AL yang pernah mendapatkan KPR baik prajurit maupun PNS yang ada di lingkungan Satuan Kerja (Satker) Denma Mabasal yaitu sebanyak 1001 orang (Tabel-3.1).

Tabel – 3.1
Jumlah Populasi Anggota TNI AL Yang Mendapat KPR

NO	LOKASI PERUMAHAN NON DINAS TNI AL	MILITER			JML	PNS			JML	JML MIL+PNS
		PA	BA	TA		GOL III	GOL II	GOL I		
1.	KPR BUM ASABRI PROGSUS CIBARUSAH	17	44	46	107	5	34	7	46	153
2.	KPR BUM ASABRI PROGSUS JONGOL	42	96	35	173	8	98	9	115	288
3.	KPR BUM ASABRI PROGREG CIBARUSAH	5	16	19	40	2	8	2	12	52
4.	KPR BUM ASABRI PROGREG JONGOL	15	27	42	84	9	25	2	36	120
5.	KPR BUM YKPP DEPHAN TAMAN RAHAYU REGENCY-2 BEKASI	1	27	23	51	2	8	3	13	64
6.	KPR BUM YKPP DEPHAN CITRA INDAH JONGOL	8	26	26	60	5	28	2	35	95
7.	KPR BUM YKPP DEPHAN VILLA DAYEUH CILEUNGS	11	16	25	52	1	4	4	9	61
8.	KPR BUM YKPP DEPHAN GRIYA JAYA CIKEAS	25	57	38	120	12	33	1	46	166
	JUMLAH	124	309	256	687	44	238	30	312	1001

Sumber : Diswatpersal, 2007.

²⁸)Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta : Andi Offset, Jilid 4, 1995) hal. 38

2. Sampel penelitian.

Sampel²⁹ adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sampel juga harus mempunyai paling sedikit satu sifat yang sama, baik sifat kodrat maupun sifat pengkhususan. Proporsi dari sampel, yaitu perimbangan antara jumlah sampel dan jumlah populasi, mungkin sangat besar mungkin sangat kecil. Seberapa besar yang sebaiknya proporsi sampel yang kita selidiki, tergantung kepada macam-macam faktor pertimbangan. Misalnya saja jika ada pengetahuan, bahwa keadaan populasi adalah homogen, mengambil sampel yang terlalu besar hampir-hampir tidak ada gunanya. Syarat utama agar dapat ditarik suatu generalisasi adalah bahwa sampel yang kita gunakan dalam penyelidikan harus menjadi cermin dari populasi atau sampel harus mewakili populasi.³⁰

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *Stratified Cluster Sampling*. Stratifikasi golongan pangkat termasuk wilayah hunian KPR yang menjadi responden merupakan pertimbangan yang utama dalam menentukan sampel. Sedangkan untuk menghitung jumlah sampling dari masing-masing strata dihitung berdasarkan persentasi dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \% \times N$$

Ket :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

% = jumlah persen yang kita tentukan.

Berdasarkan rumus tersebut di atas dan dengan pertimbangan kadar keterwakilan dari strata sampling yang diteliti, maka besarnya sampling ditetapkan sebesar 10 % atau 100 orang, dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

a. Militer :

²⁹)Sujana, *op. cit.*, hal. 28.

³⁰)Sutrisno Hadi, *op., cit.*, hal. 41

F. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.

1. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang sifatnya teoritis dan sehubungan dengan bidang-bidang sedang diteliti, seperti buku-buku, majalah, dokumen jurnal penelitian, dan berbagai literatur lainnya. Penelaahan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Studi kepustakaan sering disebut juga data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi-informasi yang disediakan oleh unit atau lembaga-lembaga yang ada.

2) Studi lapangan.

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ke tempat penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi.

Berupa pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala fisik untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dengan demikian penelitian tidak terlibat secara langsung dalam proses pekerjaan, akan tetapi hanya mengamati aktivitas yang sedang

berlangsung, yaitu dengan mendatangi Unit-Unit Kerja yang terkait dengan penyediaan KPR bagi anggota TNI AL.

b. Wawancara.

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden (Nara Sumber). Wawancara dilakukan dimaksudkan untuk mengadakan tanya jawab dengan mempergunakan *pedoman wawancara* secara langsung dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyediaan KPR bagi anggota TNI AL, juga sekaligus melengkapi data yang belum lengkap atau belum jelas dari data yang terjaring melalui hasil angket.

c. Angket..

Angket adalah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yang telah dijadikan sample. Dalam penelitian ini digunakan angket yang berupa daftar pernyataan tertulis dan berstruktur serta tertutup, artinya daftar pernyataan yang diajukan disertai dengan alternatif jawaban berskala *interval* untuk dipilih oleh responden guna memperoleh keterangan mengenai masalah yang dibahas. Selanjutnya angket (*questionare*) disebarkan kepada seluruh responden yang akan diteliti.

Angket merupakan data primer yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan atau menjawab masalah yang akan diteliti.. Hal ini dimaksudkan guna mengetahui tanggapan

pribadinya terhadap suatu masalah yang diajukan sesuai dengan hal-hal yang diperlukan.

2. Metode Pengolahan Data.

Data yang telah diterima dalam bentuk hasil angket kemudian dikelompokkan, ditabulasikan dan dibuat perhitungan agar data tersebut dapat memberikan informasi tentang gambaran keadaan responden serta implikasinya.

Jawaban angket diukur dengan menggunakan Skala Likert, menurut Sugiono³¹ bahwa setiap item instruments yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata antara lain (1) Setuju; (2) Kurang Setuju; (3) Tidak Setuju. Berdasarkan pendapat di atas penulis menggunakan jenjang 5 (lima), kemudian untuk kepentingan analisis secara kualitatif maka jawaban atau pernyataan ini diberi skors dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Untuk pernyataan di kolom 1 dengan kriteria **Selalu/Sangat Setuju** diberi skor 5.
- Untuk pernyataan di kolom 2 dengan kriteria **Sering/Setuju** diberi skor 4.
- Untuk pernyataan di kolom 3 dengan kriteria **Kadang-kadang/Jarang** diberi skor 3.
- Untuk pernyataan di kolom 4 dengan kriteria **Tidak Pernah/Tidak Setuju** diberi skor 2.
- Untuk pernyataan di kolom 5 dengan kriteria **Tidak Tahu** diberi skor 1.

Dalam pemberian Skors seperti tersebut di atas maka akan diperoleh variasi jawaban yang bergerak dari 1 -- 5. Karena itu interval antara satu kriteria dengan kriteria lainnya diperoleh angka = 0,80. Hal ini diperoleh setelah adanya pengurangan dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi banyaknya alternatif jawaban, yang dalam bentuk angkanya :

³¹) Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 1998) hal. 31

$$\frac{5-1}{5} = \frac{4}{5} = 0,80$$

Berangkat dari ketentuan tersebut di atas, maka tingkat kategori jawaban yang diperoleh dilakukan dengan kriteria penafsiran sebagai berikut:

- 1,00 – 1,80 berarti sangat buruk
- 1,81 – 2,61 berarti buruk
- 2,62 – 3,42 berarti cukup.
- 3,43 – 4,23 berarti baik
- 4,24 – 5,00 berarti sangat baik.

Kemudian untuk memperoleh angka penafsiran (Mean) digunakan rumus:

$$M = \sum (f(X)/n)$$

Keterangan:

M	=	Perolehan angka kriteria penafsiran
F	=	Frekuensi jawaban
X	=	Pembobotan
n	=	Jumlah seluruh jawaban (jumlah responden)
\sum	=	Penjumlahan ³²

G. Teknik Analisa Data.

Untuk analisis data dan pengujian hipotesis (Pembuktian Asumsi) menggunakan teknik analisis kualitatif dalam bentuk kuantifikasi dengan skala interval. Hasil angket dipadukan dengan hasil wawancara sehingga diperoleh informasi yang lebih akurat dan obyektif dari penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL.

H. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Unit-Unit Kerja yang berada di lingkungan Satuan Kerja Denma Mabasal. Adapun lamanya penelitian diperkirakan memerlukan tempo waktu selama 6 bulan sejak awal kegiatan berupa pengamatan obyek yang akan

³² Hadi Sutrisno, *op. cit.*, Jilid 3, hal.18

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.

1. Kondisi Umum.

TNI AL adalah lembaga militer yang memiliki corak ragam organisasi militer yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan model kesisteman berupa Sistem Senjata Armada Terpadu yang meliputi : KRI, Pesud, Pangkalan dan Marinir. Personel pengawak selain mayoritas militer juga diisi oleh PNS TNI AL pada sektor-sektor non tempur dan non komando serta tersebar di jajaran pangkalan-pangkalan TNI AL di seluruh wilayah Tanah Air.

Pusat penyelenggaraan organisasi TNI AL adalah Markas Besar TNI AL yang berlokasi di Cilangkap – Jakarta Timur dibawah pimpinan Kepala Staf TNI AL. Sedangkan sistem komando langsung untuk fungsi operasi semuanya berada di bawah komando Panglima TNI melalui para Panglima Armada Kawasan.

Detasemen Markas adalah salah satu ciri pokok dari suatu organisasi militer di Indonesia, sehingga setiap satuan organisasi baik besar maupun kecil di lingkungan militer selalu terdapat organisasi satuan pendukung yang disebut Detasemen Markas (Denma). Oleh karena itu, satuan organisasi pendukung ini berada dan mendukung gugus tugas Markas Besar TNI AL, maka organisasi pendukung tersebut disebut dengan nama Denmabesal (Detasemen Markas Besar Angkatan Laut). Sedangkan untuk menunjukkan suatu satuan personel pengawak pada suatu organisasi sering disebut dengan Satuan Kerja Denmabesal (Satker Denmabesal).

Satker Denmabesal memiliki fungsi selain pendukung organisasi sekaligus juga organisasi yang bertanggung jawan dalam memelihara tata tertib dan kehidupan dinas dalam di lingkungan Mabes TNI AL.

2. Struktur Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dibentuk berdasarkan Skep Pangab Nomor : Kep/08/VII/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI AL. Perkembangan lingkungan strategik baik global, regional maupun nasional yang berubah secara dinamis, cepat dan sulit diprediksi mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk tantangan tugas TNI AL ke depan, sesuai UU TNI Nomor 34 tahun 2004 pasal 9 tugas TNI AL adalah:

- a. Melaksanakan tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan.
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan Politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam membangun dan mengembangkan kekuatan Matra Laut.
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan lau.

Beberapa tantangan tugas ke depan yang perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh TNI AL adalah:

- a. Antisipasi terhadap masalah Wilayah Perbatasan Laut.
- b. Antisipasi terhadap corong-corong strategik.
- c. Antisipasi terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut.
- d. Antisipasi terhadap pengamanan ALKI.
- e. Antisipasi untuk menunjang Operasi Keamanan Dalam Negeri.

- f. Antisipasi terhadap perimbangan kekuatan negara-negara tetangga.
- g. Antisipasi terhadap tugas-tugas internasional di bawah naungan PBB.

Perubahan Konsep strategik TNI AL. TNI AL sebagai bagian integral dari TNI, secara proporsional mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan kedaulatan negara di laut dengan mewujudkan kondisi laut terkendali. Terwujudnya kondisi laut yang terkendali, berarti laut yuridiksi nasional secara leluasa dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional baik dalam aspek kesejahteraan maupun keamanan, sedangkan di sisi lain laut yuridiksi nasional tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lawan atau calon lawan.

Sementara itu, pada pasal 2 ayat (2) UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa Pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Hal ini mempertegas bahwa strategi pertahanan negara harus mengedepankan strategi pertahanan laut nusantara. Mau tidak mau, dalam merealisasikan terwujudnya kondisi laut yang bebas dari ancaman kekerasan dengan penggunaan kekuatan bersenjata, bebas dari ancaman navigasi bagi kelancaran jalur perdagangan ekonomi dunia, bebas dari ancaman terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya laut serta bebas dari ancaman pelanggaran hukum, perlu Angkatan Laut yang mampu mengendalikan lautan demi kepentingannya. Perlu Angkatan Laut yang disegani oleh para pelaku pelanggaran hukum maupun sebagai deterrence agar disegani oleh pihak-pihak asing yang akan mengganggu keamanan dan keutuhan wilayah negara. Konsep strategik TNI AL yang selama ini ada yaitu Kecil, Efektif dan Efisien tidak memungkinkan memiliki kemampuan untuk menjamin kepentingan nasional di dan atau lewat laut, sehingga TNI AL memandang perlu mengubah konsep strategiknya dan juga menjadi visi TNI AL ke depan.

Adapun perubahan tersebut adalah:

- a. TNI AL yang besar, dimaksudkan bahwa jumlah unsur yang dimiliki TNI AL sebanding dengan rasio perairan yang harus dijaga.
- b. TNI AL yang kuat, dimaksudkan bahwa kemampuan pukul strategis dari unsur yang dimiliki mampu memberikan dampak penangkalan dan daya hancur terhadap musuh yang akan mengganggu kedaulatan negara.
- c. TNI AL yang profesional, dimaksudkan bahwa kemampuan tempur prajurit TNI AL dapat diandalkan dan memenuhi standar profesionalisme prajurit dengan selalu berorientasi pada perkembangan teknologi Alat Utama Sistem Senjata (Alut Sista) yang diwakinya.

Berdasarkan Keputusan Pangab Nomor Kep/08/VII/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI AL, secara umum profil Organisasi TNI AL saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan : Kasal
- b. Unsur Pembantu Pimpinan
 - 1) Wakasal.
 - 2) Irjenal.
 - 3) Koorsahli Kasal terdiri dari 6 Kelompok Sahli.
 - 4) Asisten Kasal terdiri atas 5 Asisten.
 - 5) Spri Kasal.
- c. Unsur Pelayanan/Pelaksana
 - 1) Puskodal.
 - 2) Denmako.
 - 3) Setumal.

- d. Unsur Pelaksana Pusat terdiri dari 21 Kedinasan, 2 Balakpus dan 28 Unsur Pelaksana Teknis (UPT).
- e. Kotama Fungsional : Kodikal.
- f. Kotama Pembinaan : Kormar.
- g. Kotama Pembinaan/Operasional :
 - 1) Kolinlamil.
 - 2) Koarmatim dan Koarmabar yang masing-masing membawahi Lantamal, Lanal dan Lanudal.

3. Struktur Organisasi Dinas Perawatan Personel (Diswatpersal) Dan Profil Debitur Serta Proses Administrasi Penyediaan KPR Untuk Anggota TNI AL Di Lingkungan Satker Denmabesal.

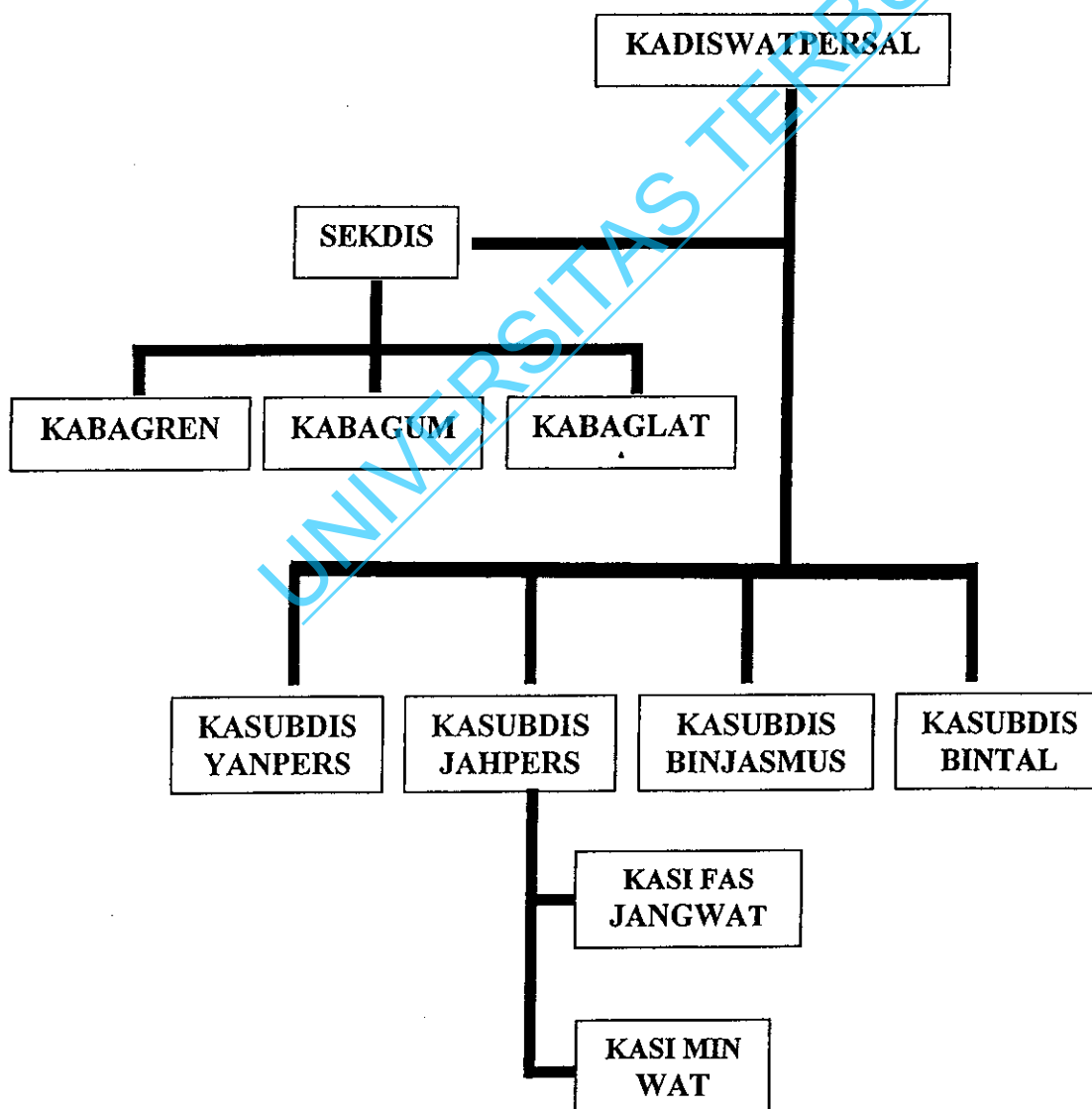
Dinas Perawatan Personel (Diswatpersal) merupakan organisasi pelaksana pusat yang terakit langsung dalam membina personel TNI AL baik militer maupun PNS sehingga dapat terpelihara baik fisik maupun morilnya, termasuk di dalamnya membina moril melalui pemberian kesejahteraan dalam bidang kredit pemilikan rumah (KPR).

Diswatpersal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasal yang dalam hal ini dirumuskan oleh Asisten Personel Kasal melalui suatu kegiatan Panitia Kerja (Panja) yang melibatkan berbagai instansi yang terkait seperti : Inkopal Induk Koperasi TNI AL, Baladiarumal (Badan Pelaksana Penyediaan Rumah Non Dinas TNI Angkatan Laut) dan Dinas Keuangan TNI AL (Diskual).

Pada gambar-4.1 tentang Struktur Organisasi Diswatpersal di bawah ini nampak bahwa tugas dan fungsi Diswatpersal dalam bidang penyediaan rumah non

dinas untuk anggota, bahwa selain memberikan pelayanan kepada anggota juga terlibat langsung dalam perumusan kebijakan yang dirumuskan oleh Kasal dhi Aspers Kasal. Sedangkan Baladiarumal adalah pelaksana teknis yang terkait dengan aspek penyediaannya. Demikian pula Diskual (Dinas Keuangan TNI AL) memiliki peran dalam mengelola debitur dan kreditur dalam 'processing' pembiayaan dalam pembangunannya.

Gambar - 4.1
STRUKTUR ORGANISASI DISWATPERSAL



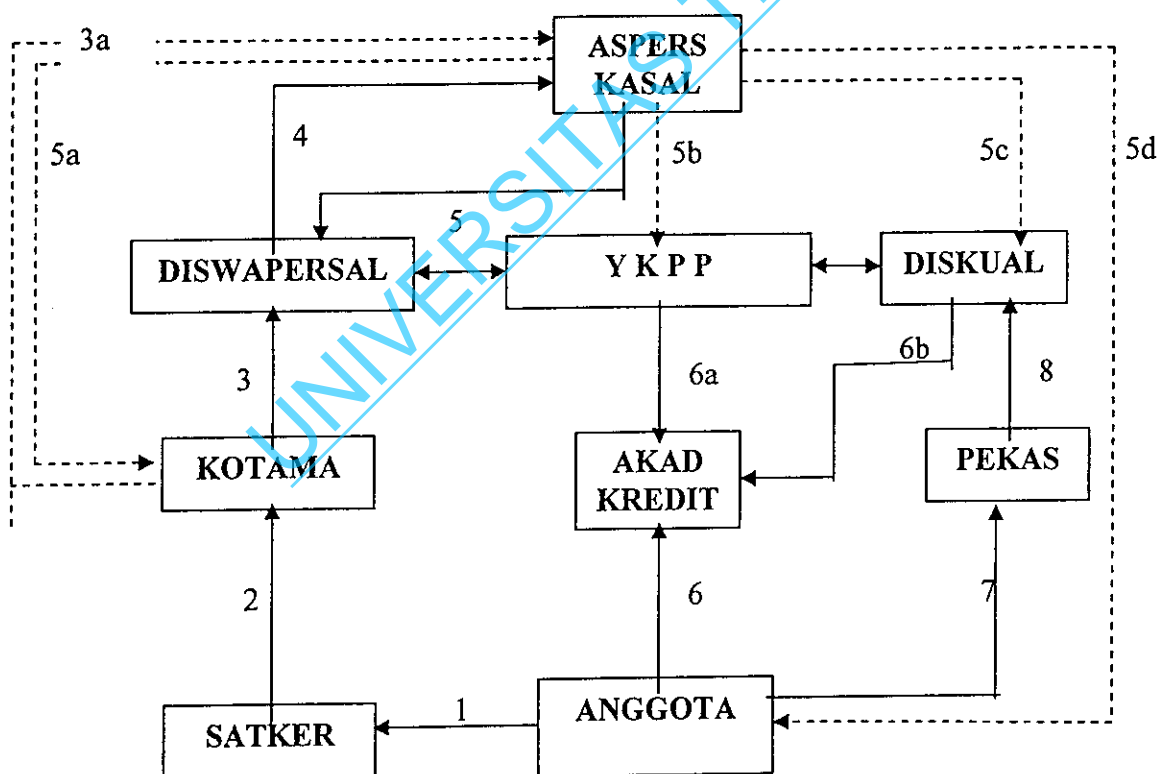
Pelayanan penyediaan rumah non dinas berupa KPR untuk anggota hanya diberikan kepada anggota yang sudah memenuhi syarat untuk memperoleh KPR. Oleh karena itu profil debitur penerima KPR TNI AL haruslah yang memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini :

- a. Anggota TNI AL aktif.
- b. Mempunyai proyeksi masa kerja atau dinas aktif di lingkungan TNI AL sekurang-kurangnya:
 - 1) Lima belas tahun untuk Perwira Pertama, Bintara, Tamtama dan PNS sederajat.
 - 2) Sepuluh tahun untuk Perwira Menengah/PNS sederajat.
 - 3) Prioritas diberikan kepada anggota yang memiliki masa kerja lebih lama.
- c. Berkonduite baik.
- d. Sudah menikah/berkeluarga atau telah berusia lebih dari 30 tahun.
- e. Apabila terdapat anggota TNI AL yang suami/istri kedua-duanya anggota TNI AL, kesempatan hanya diberikan kepada salah seorang, suami atau istri yang mempunyai pangkat/golongan lebih tinggi.
- f. Tidak memiliki rumah sendiri dan tidakmendapat/menempati rumah dinas TNI AL.
- g. Tidak atau belum pernah membeli atau menerima pelepasan akomodasi dari TNI AL yang berupa:
 - 1) Rumah milik TNI AL.
 - 2) Rumah atau tanah penguasaan TNI AL.
 - 3) Penukaran milik TNI AL.
- h. Belum pernah mendapat fasilitas bantuan Kredit Pemilikan Rumah.

- i. Bagi personel TNI AL yang memenuhi semua persyaratan tersebut, namun proyeksi masa kerjanya kurang dari yang ditentukan, masih diberi peluang untuk mendapatkan KPR TNI AL. Peluang tersebut disesuaikan dengan rumah yang tersedia serta dengan persyaratan KPR dapat dilunasi pada saat yang bersangkutan mengakhiri masa dinas di TNI AL.

Selanjutnya mekanisma dalam proses pemberian KPR untuk anggota TNI AL dapat digambarkan pada Gambar-4.2 tentang Skema Pengajuan KPR Oleh Anggota di bawah ini, yaitu sebagai berikut :

Gambar-4.2
Skema Pengajuan KPR Oleh Anggota



Keterangan:

1. Anggota mengajukan permohonan kepada Kasatker (dilengkapi persyaratan).

2. Kasatker meneruskan permohonan anggota (yang memenuhi persyaratan) kepada Pimpinan Kotama.
3. Kotama meneruskan permohonan kepada Kadiswatpersal, dengan tembusan Aspers Kasal dan Kabaladiarumal.
4. Atas dasar usulan Kotama, Kadiswatpersal meneliti dan memproses, berkoordinasi dengan Kabaladiarumal untuk mengajukan konsep Surat Keputusan Kasal (penunjukan-kepemilikan) kepada Aspers Kasal.
5. Aspers Kasal (Atas nama Kasal) menerbitkan Surat Keputusan penunjukan pemilikan rumah kepada Kadiswatpersal, dengan tembusan Pemimpin Kotama, Kadiskual, Kabaladiarumal dan anggota yang ditunjuk.
6. Anggota yang ditunjuk /mendapat rumah, melaksanakan akad kredit dengan TNI AL (dalam hal ini Kadiskual dan Kabaladiarumal).
7. Setelah akad kredit anggota (debitur) melaksanakan pembayaran angsuran bulanan melalui potongan oleh Pekas pembayar gaji.
8. Selanjutnya menyetorkan pengutan angsuran dari debitur ke rekening Kadiskual.

Adapun tugas dan fungsi dari lembaga atau satuan organisasi TNI AL yang terkait dalam proses mekanisme pengajuan KPR tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kadiswatpersal.

- 1) Melaksanakan pembuatan rencana kebutuhan rumah untuk anggota TNI AL termasuk tipenya, serta mengajukan kebutuhan rumah kepada Kasal dalam hal ini Aspers Kasal.
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan Baladiarumal untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah yang dibangun pada lokasi pembangunan perumahan KPR TNI AL.
- 3) Melaksanakan rekrutmen bagi calon Debitur dan melaksanakan distribusi perumahan tersebut kepada Debitur.
- 4) Memproses dan mengusulkan pemilikan, penggantian dan pencabutan hak penghunian bagi Debitur yang tidak mentaati ketentuan.

b. Kadiskual.

- 1) Sebagai bendaharawan KPR TNI AL menyiapkan dana untuk pembangunan perumahan sesuai kebijakan Kasal.

- 2) Melaksanakan pembayaran tagihan pembangunan perumahan, pengolahan lahan dan biaya lainnya kepada pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Kasal.
- 3) Menandatangani Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa yang ditunjuk oleh dan untuk kepentingan TNI AL.
- 4) Mengelola administrasi keuangan KPR TNI AL dari para debitur, mulai dari pembayaran uang muka, pelaksanaan pembayaran angsuran sesuai perhitungan yang ditetapkan dalam akad kredit melalui jalur Badan-badan Keuangan, sampai dengan selesai masa angsuran (selesai kontrak).
- 5) Melaksanakan peneguran bagi Debitur yang terlambat melaksanakan kewajiban dan melaporkan kepada Aspers Kasal.
- 6) Menyimpan seluruh dokumen bukti rumah kepada Debitur yang telah selesai mengangsur (selesai kontrak) sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Kabaladiarumal.

- 1) Membuat perencanaan pembangunan perumahan Non Dinas TNI AL sesuai dengan arahan Kasal.
- 2) Menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pematangan, pengolahan lahan, pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung lainnya setelah mendapat persetujuan dari Kasal.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan Kadisfaslanal dalam proses penyiapan master plan dan spesifikasi teknis bangunan rumah.
- 4) Perhitungan biaya pembangunan rumah beserta sarana dan prasarananya (dilampiri master plan dan spektek bangunan) kepada Kasal dan berkoordinasi dengan Kadiskual dan Kadiswatpersal.

- a) Membuat rencana kebutuhan rumah untuk Parjurit dan PNS TNI AL termasuk tipe rumah yang diperlukan dengan mengacu kepada permintaan Kotama.
 - b) Mengajukan surat permohonan jumlah rumah yang diperlukan kepada Kasal dalam hal ini Aspers Kasal termasuk distribusi ke Kotama-kotama.
- 2) Kadiskual. Menyiapkan administrasi KPR TNI AL dengan menggunakan fasilitas sistem komputerisasi yang telah ada di jajaran keuangan TNI AL.
- 3) Kabaladjarumal.
- a) Membuat master plan perumahan dan spektek bangunan rumah termasuk sarana dan prasarananya yang dibutuhkan, berkoordinasi dengan Disfaslanal.
 - b) Membuat perkiraan pembiayaan pembangunan perumahan melalui KPR TNI AL, termasuk perkiraan biaya cut and fill serta sarana prasarananya.
 - c) Mengajukan perkiraan biaya di atas kepada Kasal.
- b. Pembangunan perumahan yang diawali dengan pematangan lahan dilaksanakan oleh Developer yang dikoordinasikan oleh Baladjarumal dalam rangka menyiapkan rumah siap pakai bagi anggota, yaitu:
- 1) Menyiapkan sarana lingkungan seperti:
 - a) Jalan.
 - b) Saluran air dan gorng-gorong.
 - c) Saluran/aliran listrik.
 - d) Fasilitas air bersih.

- e) Fasilitas umum dan sosial.
- 2) Bangunan rumah ditetapkan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a) Harga dapat dijangkau oleh anggota yang umumnya mempunyai kemampuan keuangan terbatas.
- b) Harus mengantisipasi konsep rumah tumbuh, dengan kategori rumah adalah Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS).
- c) Tipe rumah dan peruntukannya:

NO	TYPE	LUAS		PERUNTUKAN
		RUMAH	TANAH	
1	2	3	4	5
1	T-45/144	45	144	Pamen/PNS sederajat
2	T-36/128	36	128	Pama/PNS sederajat
3	T-27/98	27	98	Bintara/PNS sederajat
4	T-21/84	21	84	Tamtama/PNS sederajat

- d) Type rumah dan luas tanah disesuaikan dengan lokasi perumahan yang dibangun.
- c. Perhitungan biaya pembangunan rumah atau sering disebut dengan Harga Jual terdiri dari 3 (tiga) komponen biaya meliputi harga tanah, harga kapling dan harga bangunan rumah.
- 1) Harga Tanah. Perhitungan atas harga tanah berdasarkan investasi untuk pembebasan tanah, meliputi investasi untuk pengurusan izin prinsip dan izin lokasi, investasi untuk pembelian tanah dan investasi untuk pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Harga tanah ini akan diatur kemudian sesuai kebijakan pemimpin TNI AL.

2) Harga Kapling. Harga kapling diperhitungkan dari investasi untuk menciptakan/menjadikan Kapling Siap Bangun (KSB), yang meliputi investasi untuk pematangan tanah (Cut and Fill atau pengurugan), investasi untuk pembuatan jalan, sistem drainase, jaringan listrik, lampu penerangan jalan dan penanaman pohon pelindung jalan.

Besarnya pengenaan harga kapling ditentukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

- a) Harga kapling = Luas lahan dikalikan dengan Index harga kapling.
- b) Index harga kapling = Total investasi biaya untuk lahan siap bangun dibagi dengan Total luas kapling yang dijual

3) Harga bangunan rumah. Besarnya pengenaan harga rumah ditentukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

- a) Harga bangunan rumah = luas bangunan X index harga bangunan.
- b) Index harga bangunan ditentukan berdasarkan : Investasi biaya untuk membuat 1 (satu) unit rumah dibagi dengan Luas bangunan.
- c) Investasi 1 (satu) unit rumah adalah total biaya dari Rencana Anggaran belanja (RAB) pembuatan 1 (satu) unit rumah sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan.
- d) Luas bangunan adalah luas lantai rumah.

Proses administrasi akad kredit dan penyerahan rumah yang harus dilakukan oleh debitur adalah sebagai berikut :

- a. Penunjukan Perolehan Rumah. Penunjukan perolehan rumah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kasal dalam hal ini Aspers Kasal atas usulan dari Diswatpersal dan Kotama-kotama.
- b. Akad Kredit. Akad kredit dilaksanakan apabila penunjukan perolehan rumah telah selesai, dan Debitur sudah melengkapi segala persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Baladiarumal, serta telah membayar semua kebutuhan biaya-biaya akad kredit, yang meliputi:
 - 1) Uang muka.
 - 2) Biaya Legalitas, terdiri atas:
 - a) Akte Jual Beli.
 - b) IMB.
 - c) Sertifikat Pecahan.
 - d) PPh Final.
 - e) Model "A" (Khusus Wiltim)
 - 3) Biaya proses KPR, terdiri atas:
 - a) Biaya materai.
 - b) Akte Notaris/SKMHT.
 - c) Biaya realisasi akad kredit.
 - 4) Asuransi Kebakaran.
 - 5) Asuransi Jiwa/pelunasan KPR.
- c. Penyerahan rumah dilaksanakan setelah akad kredit.

B. Analisa *Kuantitatif* Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyediaan KPR Bagi Anggota TNI AL

1. Dimensi Transparansi.

Informasi dalam suatu proses pencapaian suatu tujuan seperti adanya informasi bahwa akan ada pembangunan perumahan untuk anggota berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah merupakan sebuah 'jendela' dari sebuah sistem dari suatu *platform* institusi publik. Artinya bahwa 'jendela' dari sebuah sistem tersebut merupakan salah satu pintu guna mendukung dari sebuah proses pencapaian tujuan yang menerapkan asas manajemen terbuka. Atas dasar hal tersebut, maka dalam penelitian dimensi transparansi ditunjukkan melalui indikator sebagai berikut :

- a. Adanya manajemen terbuka; yang dapat penulis gambarkan dalam beberapa indikasi penafsiran responden sebagai berikut :
 - 1) *Pemberian informasi rencana pembangunan KPR pada anggota.*
 - 2) *Partisipasi dalam perencanaan.*
 - 3) *Pemberian alternatif pilihan lokasi.*
- b. Ada komunikasi dua arah dalam informasi dan aspirasi; yang dapat penulis gambarkan pada indikasi penafsiran responden dalam kegiatan *Menampung aspirasi anggota.*
- c. Standar perencanaan yang jelas, terbuka dan aspiratif; yang dapat penulis gambarkan dalam beberapa indikasi sebagai berikut :
 - 1) *Peninjauan Lapangan.*
 - 2) *Rumah Contoh Untuk Standarisasi Pembangunan.*
- d. Proses formulasi yang aspiratif dan terbuka; yang dapat penulis gambarkan pada indikasi penafsiran responden dalam kegiatan *Monitoring Proses Penyediaan KPR.*

Dengan berpedoman pada indikasi-indikasi seperti telah penulis uraikan di atas, maka berikut ini dapat penulis gambarkan secara kuantitatif hasil penelitian yang bersumber dari angket yang diisi oleh responden beserta informasi lainnya yang dapat penulis serap melalui wawancara dan dialog dengan responden yang diteliti.

a. *Pemberian informasi rencana pembangunan KPR pada anggota.*

Berdasarkan Tabel-4.1 di bawah ini tampaknya responden yang mengatakan 'selalu' hanyalah sebesar 24 %, yang menyatakan 'sering' ada 39 % dan yang menyatakan 'kadang-kadang' ada 33 %. Sedangkan responden yang menyatakan 'tidak pernah' ada 3 % dan yang menyatakan 'tidak tahu' ada 1 %. Adapun tingkat penafsiran responden dalam masalah ini adalah 3,82 atau 'Baik'. Atas dasar dari ungkapan data di atas maka dapatlah dikatakan bahwa manajemen terbuka yang dilakukan institusi TNI AL dalam melayani anggotanya untuk memenuhi kebutuhan panggon (KPR) cukup baik dan terbuka. Hal ini kiranya bisa sebagai indikasi adanya suatu transparansi dalam proses formulasi dari rencana suatu program.

Tabel – 4.1
Tanggapan Responden Tentang Transparansi (Adanya Manajemen Terbuka)
Berupa Informasi Rencana Pembangunan Perumahan Untuk Anggota

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	24	24	5	120	M = $\frac{382}{100}$ = 3,82
Sering	39	39	4	156	
Kadang-Kadang	33	33	3	99	
Tidak Pernah	3	3	2	6	
Tidak Tahu	1	1	1	1	
Jumlah	100	100		382	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Komunikasi timbal balik antara lembaga dengan anggota dalam suatu organisasi dengan manajemen terbuka sebagaimana hubungan antara konsumen dan produsen merupakan hubungan simbiosis mutualisme (hubungan saling menguntungkan). Sedangkan kunci utama yang harus ada dalam hubungan tersebut

adalah 'kepercayaan' yang perwujudannya berupa adanya saling komunikasi pada kedua belah pihak, dalam hal ini ditunjukkan oleh adanya partisipasi anggota dalam kegiatan perencanaan penyediaan kebutuhan perumahan untuk anggota. Ini dimaksudkan guna memenuhi suatu kepuasan dari anggota yang akan menggunakannya rumah tersebut.

b. Partisipasi dalam perencanaan.

Pada Tabel-4.2 di bawah ini terlihat bahwa pelibatan anggota sebagai konsumen dalam proses perencanaan penyediaan KPR dapat dilihat pada pernyataan responden di bawah ini dimana terdapat 8 % menyatakan 'kadang-kadang', terdapat 59 % menyatakan 'tidak pernah' dan 33 % menyatakan 'tidak tahu'. Sedangkan responden yang menyatakan 'selalu' dan 'sering' adalah 'nihil'. Akibatnya tingkat penafsiran responden yang diperoleh adalah 1,75 atau 'Sangat Buruk'.

Tabel – 4.2
Tanggapan Responden Tentang Transparansi (Adanya Manajemen Terbuka)
Berupa Partisipasi Dalam Perencanaan Penyediaan Perumahan Untuk Anggota

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	-	-	5	-	175
Sering	-	-	4	-	M = $\frac{175}{100}$
Kadang-Kadang	8	8	3	24	100
Tidak Pernah	59	59	2	118	
Tidak Tahu	33	33	1	33	= 1,75
Jumlah	100	100		175	Sangat Buruk

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

c. Pemberian alternatif pilihan lokasi.

Proses memilih atau diberikan alternatif pilihan pada suatu lokasi perumahan adalah harapan dari para anggota atau konsumen. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada beberapa anggota mereka sangat menginginkan pilihan lokasi yang terdekat dengan tempat bertugas. Pada Tabel-4.3 di bawah ini tampak bahwa

responden yang mengatakan 'kadang-kadang' ada 16 %, yang menyatakan 'tidak pernah' ada 54 % dan yang menyatakan 'tidak tahu' ada 30 %. Sedangkan yang mengatakan 'selalu' dan 'sering' adalah nihil atau 0 %. Dengan demikian tingkat interpretasi responden yang dapat diperoleh adalah 1,86 atau 'Buruk'. Artinya bahwa transparansi berupa alternatif pilihan lokasi perumahan jarang dilakukan dan sebagian besar tidak pernah dilakukan.

Tabel – 4.3
Tanggapan Responden Tentang Transparansi (Adanya Manajemen Terbuka)
Berupa Pilihan Alternatif Dalam Menentukan Lokasi Perumahan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	-	-	5	-	186
Sering	-	-	4	-	$M = \frac{186}{100}$
Kadang-Kadang	16	16	3	48	
Tidak Pernah	54	54	2	108	
Tidak Tahu	30	30	1	30	= 1,86
Jumlah	100	100		186	Buruk

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Rata-rata tingkat penafsiran 'adanya manajemen terbuka' seperti ditunjukkan pada Tabel-4.1, Tabel-4.2 dan Tabel-4.3 tersebut di atas, adalah : $(3,82 + 1,75 + 1,86) : 3 = 2,49$ atau 'Buruk'.

d. Menampung aspirasi anggota.

Transparansi berupa masukan atau input baik yang bersifat usul maupun kritikan hendaknya dapat difasilitasi dengan baik agar antara konsumen dan produsen ada 'media' yang memungkinkan aspirasi dari konsumen dapat terwadahi. Pada Tabel-4.4 di bawah ini ada 50 % yang menyatakan 'tidak pernah' dan 50 % menyatakan 'tidak tahu'. Sedangkan responden yang menyatakan 'selalu' dan 'sering' adalah 'nihil' atau 0 %. Adapun tingkat penafsiran responden yang diperoleh adalah 1,50 atau 'Sangat Buruk'.

Tabel – 4.4
Tanggapan Responden Tentang Transparansi
(Ada Komunikasi Dua Arah Dalam Informasi Dan Aspirasi)
Berupa Penyediaan Kotak Saran Atau Aspirasi Bagi Anggota
Dalam Rangka Penyediaan Perumahan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	-	-	5	-	150
Sering	-	-	4	-	M = $\frac{150}{100}$
Kadang-Kadang	-	-	3	-	
Tidak Pernah	50	50	2	100	= 1,50
Tidak Tahu	50	50	1	50	
Jumlah	100	100		150	Sangat Buruk

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

e. *Peninjauan Lapangan.*

Selanjutnya transparansi ditunjukkan oleh adanya upaya publikasi kepada konsumen tentang perumahan contoh yang akan dibangun. Hal seperti ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada konsumen yaitu para anggota TNI AL para calon debitur untuk melakukan peninjauan ke lapangan langsung dengan melihat perumahan contoh yang akan dibangun. Pada Tabel-4.5 di bawah ini tampak bahwa responden yang menyatakan 'selalu' hanya ada 1 %, yang menyatakan 'sering' juga hanya 1 %, sedangkan yang menyatakan 'kadang-kadang' ada 13 %, yang menyatakan 'tidak pernah' ada 53 % dan yang menyatakan 'tidak tahu' ada 32 %. Adapun tingkat interpretasi responden yang dapat dicapai adalah 1,86 atau 'Buruk'.

Tabel – 4.5
Tanggapan Responden Tentang Transparansi
(Standar Perencanaan Yang Jelas, Terbuka Dan Aspiratif)
Berupa Kesempatan Untuk Melihat Atau Peninjauan Lapangan (Lokasi)
Terhadap Perumahan Contoh Yang Akan Dibangun

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	1	1	5	5	M = $\frac{186}{100}$ = 1,86
Sering	1	1	4	4	
Kadang-Kadang	13	13	3	39	
Tidak Pernah	53	53	2	106	
Tidak Tahu	32	32	1	32	
Jumlah	100	100		186	Buruk

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

f. *Rumah Contoh Untuk Standarisasi Pembangunan.*

Hal pokok yang mendukung upaya publikasi seperti tersebut tentunya harus adanya dukungan informasi tentang rumah contoh untuk standarisasi pembangunan perumahan (KPR). Pada Tabel-4.6 di bawah ini tampak pernyataan responden yang menyatakan 'selalu' ada 8 %, yang menyatakan 'sering' ada 14 %, yang menyatakan 'kadang-kadang' ada 54 %, yang menyatakan 'tidak pernah' ada 12 % dan yang menyatakan 'tidak tahu' ada 12 %. Sedangkan tingkat penafsiran responden mencapai 2,94 atau 'Cukup'.

Tabel – 4.6
Tanggapan Responden Tentang Transparansi
(Standar Perencanaan Yang Jelas, Terbuka Dan Aspiratif)
Berupa Informasi Atau Rumah Contoh Untuk Standarisasi Pembangunan Perumahan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	8	8	5	40	M = $\frac{294}{100}$ = 2,94
Sering	14	14	4	56	
Kadang-Kadang	54	54	3	162	
Tidak Pernah	12	12	2	24	
Tidak Tahu	12	12	1	12	
Jumlah	100	100		294	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Tabel – 4.8
Rekapitulasi Penafsiran Responden
Dimensi Transparansi

Indikator	Kriteria
-Adanya manajemen terbuka	2,49
-Ada komunikasi dua arah dalam informasi dan aspirasi.	1,50
-Standar perencanaan yang jelas, terbuka dan aspiratif.	2,40
-Proses formulasi yang aspiratif dan terbuka.	3,98
Nilai Rata-rata	2,59 atau Buruk

2. Dimensi Akuntabilitas.

Pertanggung jawaban dalam proses penyediaan KPR merupakan upaya pengendalian agar proses penyediaan KPR menjadi terukur dan terkendali. Dengan prinsip bahwa akuntabilitas dapat dikendalikan apabila memang transparansi dapat diciptakan dan terpelihara dengan baik. Oleh karena itu salah satu wujud dari upaya menciptakan akuntabilitas dalam proses penyediaan perumahan untuk anggota adalah adanya kesesuaian antara yang diharapkan dengan kenyataan secara terukur dan terkendali. Atas dasar hal tersebut, maka dalam penelitian dimensi akuntabilitas ditunjukkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Adanya pertanggungjawaban yang terbuka; yang dapat penulis gambarkan dalam beberapa indikasi penafsiran responden sebagai berikut :
 - 1) *Kesesuaian wujud rumah dengan usulan.*
 - 2) *Kesesuaian kondisi fisik dengan rencana.*
- b. Pola pengendalian proses penyediaan yang terukur dan terkendali; yang dapat penulis gambarkan pada indikasi penafsiran responden dalam kegiatan *Pertanggungjawaban penyediaan perumahan.*

Dengan berpedoman pada indikasi-indikasi seperti telah penulis uraikan di atas, maka berikut ini dapat penulis gambarkan secara kuantitatif hasil penelitian yang bersumber dari angket yang diisi oleh responden beserta informasi lainnya yang dapat penulis serap melalui wawancara dan dialog dengan responden yang diteliti.

a. Kesesuaian wujud rumah dengan usulan.

Salah satu indikasi bahwa akuntabilitas dijalankan adalah adanya rumah (KPR) yang tersedia sesuai dengan usulan atau aspirasi yang disampaikan oleh calon debitur kepada produsen. Pada Tabel-4.9 di bawah ini tampak responden yang menyatakan 'selalu' ada 32 %, yang menyatakan 'sering' ada 42 %, yang menyatakan 'kadang-kadang' ada 21 %, yang menyatakan 'tidak pernah' ada 4 % dan yang menyatakan 'tidak tahu' ada 1 %. Sedangkan penafsiran responden dalam masalah ini adalah 4,0 atau 'Baik'. Dengan demikian bahwa wujud fisik KPR pada umumnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan.

Tabel – 4.9
Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas
(Pertanggungjawaban Yang Terbuka) Berupa Wujud Fisik Rumah (KPR) Sesuai
Dengan Usulan Atau Aspirasi Yang Disampaikan

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	32	32	5	160	M = $\frac{400}{100}$ = 4,0
Sering	42	42	4	168	
Kadang-Kadang	21	21	3	63	
Tidak Pernah	4	4	2	8	
Tidak Tahu	1	1	1	1	
Jumlah	100	100		400	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

b. Kesesuaian kondisi fisik dengan rencana.

Demikian pula bila dilihat dari perbandingan kondisi fisik yang nyata dengan yang direncanakan tampaknya sudah cukup memadai atau sesuai. Hal ini dapat dilihat pada Tabel-4.10 di bawah ini dimana terdapat pendapat responden yang

menyatakan 'selalu' ada 28 %, yang menyatakan 'sering' ada 36 %, yang menyatakan 'kadang-kadang' ada 26 % dan yang menyatakan 'tidak pernah' ada 10 %. Adapun responden yang menyatakan 'tidak tahu' adalah nihil atau 0 %. Sedangkan tingkat penafsiran responden dalam masalah ini adalah 3,82 atau 'Baik'.

Tabel – 4.10
Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas
(Pertanggung Jawaban Yang Terbuka) Berupa Rumah (KPR) Memiliki Kondisi Fisik
Sesuai Dengan Rencana Semula

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	28	28	5	140	$M = \frac{382}{100} = 3,82$
Sering	36	36	4	144	
Kadang-Kadang	26	26	3	78	
Tidak Pernah	10	10	2	20	
Tidak Tahu	-	-	1	-	
Jumlah	100	100		382	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Rata-rata tingkat penafsiran dari indikator 'Pertanggung Jawaban Yang Terbuka' seperti ditunjukkan pada Tabel-4.9 dan Tabel-4.10 adalah : $(4,0 + 3,82) = 3,91$ atau 'Baik'.

c. *Pertanggungjawaban penyediaan perumahan.*

Selanjutnya yang lebih penting adalah tentang pertanggung jawaban dalam proses penyediaan rumah harus dapat diterima dengan baik dengan maksud agar citra pengelola dapat terjaga dengan baik. Pada Tabel-4.11 di bawah ini tampak bahwa responden yang menyatakan 'selalu' ada 30 %, yang menyatakan 'sering' ada 50 %, yang menyatakan 'kadang-kadang' ada 13 % dan yang menyatakan 'tidak pernah' ada 7 %. Sedangkan responden yang menyatakan 'tidak tahu' adalah nihil atau 0 %. Pada masalah ini tingkat penafsiran responden tercapai 4,03 atau 'Baik'.

Tabel – 4.11
Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas
(Pola pengendalian proses Penyediaan Yang Terukur dan terkendali) Berupa
Pertanggungjawaban Penyediaan Perumahan Dapat Diterima

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	30	30	5	155	$M = \frac{403}{100} = 4,03$
Sering	50	50	4	168	
Kadang-Kadang	13	13	3	72	
Tidak Pernah	7	7	2	1	
Tidak Tahu	-	-	1		
Jumlah	100	100		403	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Rekapitulasi penafsiran responden pada dimensi akuntabilitas adalah seperti tampak pada Tabel-4.12 di bawah ini. Adapun tingkat interpretasi rata-ratanya adalah 3,97 atau 'Baik'.

Tabel – 4.12
Rekapitulasi Penafsiran Responden
Dimensi Akuntabilitas

Indikator	Kriteria
-Pertanggungjawaban yang terbuka.	3,91
-Pola pengendalian proses penyediaan yang terukur dan terkendali.	4,03
Nilai Rata-rata	3,97 atau Baik

3. Dimensi Keadilan.

Keadilan dalam proses penyediaan rumah pada hakekatnya merupakan harapan bagi semua konsumen atau para calon debitur. Terutama keadilan dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas dalam mengurus atau mendapatkan KPR sehingga dirasakan oleh semua strata dan golongan. Atas dasar hal tersebut, maka

dalam penelitian dimensi keadilan ditunjukkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Perlakuan yang adil pada semua unsur; yang dapat penulis gambarkan berupa indikasi penafsiran responden dalam *keadilan untuk mendapatkan KPR*.
- b. Kesetaraan dalam proses kemitraan dan hubungan kerja serta dalam memberikan pelayanan; yang dapat penulis gambarkan pada indikasi penafsiran responden yang merasa *diperlakukan sebagai mitra*.

Dengan berpedoman pada indikasi-indikasi seperti telah penulis uraikan di atas, maka berikut ini dapat penulis gambarkan secara kuantitatif hasil penelitian yang bersumber dari angket yang diisi oleh responden beserta informasi lainnya yang dapat penulis serap melalui wawancara dan dialog dengan responden yang diteliti.

a. *Keadilan untuk mendapatkan KPR.*

Pada Tabel-4.13 di bawah ini tampak responden yang menyatakan 'selalu' adalah 31 %, yang menyatakan 'sering' ada 42 %, yang menyatakan 'kadang-kadang' ada 24 %, yang menyatakan 'tidak pernah' ada 2 % dan yang menyatakan 'tidak tahu' ada 1 %. Sedangkan tingkat penafsiran respondennya adalah 4,0 atau 'Baik'. Artinya bahwa pelayanan dalam mengurus atau mendapatkan KPR cukup mendapat perlakuan yang adil.

Tabel – 4.13
Tanggapan Responden Tentang Keadilan
(Perlakuan Yang Adil Pada Semua Unsur) Berupa Keadilan Pelayanan Dalam
Mengurus Atau Mendapatkan KPR

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	31	31	5	155	M = $\frac{\quad}{\quad}$ = 4.0
Sering	42	42	4	168	
Kadang-Kadang	24	24	3	72	
Tidak Pernah	2	2	2	4	
Tidak Tahu	1	1	1	1	
Jumlah	100	100		400	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

b. *Diperlakukan sebagai mitra.*

Pada dasarnya keadilan akan dapat dirasakan oleh anggota jikalau dalam proses pelayanan tersebut anggota diperlakukan sebagai mitra juga sekaligus sebagai pelanggan. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah ketika calon debitur mengurus administrasi untuk mendapatkan KPR. Hal ini dapat dilihat pada Tabel-4.14 di bawah ini dimana responden yang menyatakan 'selalu' ada 8 %, yang menyatakan 'sering' ada 14 %, yang menyatakan 'kadang-kadang' ada 51 %, yang menyatakan 'tidak pernah' ada 15 % dan yang menyatakan 'tidak tahu' ada 12 %. Sedangkan tingkat penafsiran responden dalam masalah ini adalah 2,91 atau 'Cukup'.

Tabel – 4.14
Tanggapan Responden Tentang Keadilan
(Kesetaraan Dalam Proses Kemitraan Dan Hubungan Kerja Serta Dalam Memberikan
Pelayanan) Berupa Perlakuan Sebagai Mitra Sekaligus Pelanggan Dalam Mengurus
Administrasi Untuk Mendapatkan KPR

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	8	8	5	40	M = $\frac{\quad}{\quad}$ = 2,91
Sering	14	14	4	56	
Kadang-Kadang	51	51	3	153	
Tidak Pernah	15	15	2	30	
Tidak Tahu	12	12	1	12	
Jumlah	100	100		291	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Rekapitulasi penafsiran responden pada dimensi keadilan adalah seperti tampak pada Tabel-4.15 di bawah ini. Adapun tingkat penafsiran rata-ratanya adalah 3,46 atau 'Baik'.

Tabel – 4.15
Rekapitulasi Penafsiran Responden
Dimensi Keadilan

Indikator	Kriteria
-Perlakukan yang adil pada semua unsur.	4,0
-Kesetaraan dalam proses kemitraan dan hubungan kerja serta dalam memberikan pelayanan.	2,91
Nilai Rata-rata	3,46 atau Baik

4. Dimensi Responsivitas.

Dimensi responsivitas mengisyaratkan adanya suatu kepekaan atau kepedulian yang tinggi dari pimpinan (Dinas) dalam melakukan penyediaan perumahan untuk anggota. Oleh karena itu partisipasi dan aspirasi yang muncul dari anggota hendaknya harus mampu difasilitasi dan diterima untuk mendapat tanggapan yang selayaknya dengan baik. Atas dasar hal tersebut, maka dalam penelitian dimensi responsivitas ditunjukkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Kepekaan terhadap setiap persoalan yang muncul; yang dapat penulis gambarkan berupa indikasi penafsiran responden merasa *mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah dan baik bagi para anggota yang membutuhkan informasi dan mendapat pelayanan proses administrasi.*

- b. Tanggapan terhadap semua partisipasi dan aspirasi; yang dapat penulis gambarkan pada indikasi penafsiran responden yang merasa *diperlakukan sebagai mitra*.

Dengan berpedoman pada indikasi-indikasi seperti telah penulis uraikan di atas, maka berikut ini dapat penulis gambarkan secara kuantitatif hasil penelitian yang bersumber dari angket yang diisi oleh responden beserta informasi lainnya yang dapat penulis serap melalui wawancara dan dialog dengan responden yang diteliti.

- a. *Mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah dan baik bagi para anggota yang membutuhkan informasi dan mendapat pelayanan proses administrasi.*

Perlu adanya kepekaan terhadap setiap persoalan yang muncul adalah berupa kepekaan terhadap aspirasi para anggota untuk mendapatkan informasi dan pelayanan administrasi KPR dengan cepat, mudah, murah dan baik. Pada Tabel-4.16 di bawah ini tampak responden yang menyatakan 'selalu' ada 50 %, yang menyatakan 'sering' ada 15 %, yang menyatakan 'kadang-kadang' ada 25 %, yang menyatakan 'tidak pernah' ada 8 % dan yang menyatakan 'tidak tahu' ada 2 %.

Tabel – 4.16
Tanggapan Responden Tentang Responsivitas
(Kepekaan Terhadap Setiap Persoalan Yang Muncul) Berupa Pelayanan Yang Cepat,
Mudah, Murah Dan Baik Bagi Para Anggota Yang Membutuhkan Informasi Dan
Proses Administrasi

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	50	50	5	250	M = $\frac{403}{100}$ = 4,03
Sering	15	15	4	60	
Kadang-Kadang	25	25	3	75	
Tidak Pernah	8	8	2	16	
Tidak Tahu	2	2	1	2	
Jumlah	100	100		403	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

b. *Diperlakukan sebagai mitra.*

Hal penting lainnya yang terkait dengan aspek responsivitas adalah adanya ketanggap segerakan Dinas dalam mewadahi partisipasi dan aspirasi dari anggota, maka sudah seyogyanya Dinas cepat tanggap dan berusaha keras untuk mewadahi aspirasi dari para anggota yang membutuhkan KPR. Pada Tabel-4.17 di bawah ini tampak responden yang menyatakan 'selalu' ada 7 %, yang menyatakan 'sering' ada 14 %, yang menyatakan 'kadang-kadang' ada 53 %, yang menyatakan 'tidak pernah' ada 14 % dan yang menyatakan 'tidak tahu' ada 12 %. Sedangkan tingkat interpretasi responden yang dapat diperoleh adalah 2,9 atau 'Cukup'. Berdasarkan data tersebut tampaknya kepekaan dan upaya Dinas untuk memfasilitasi kepentingan anggota masih lemah dan kurang aspiratif.

Tabel – 4.17
Tanggapan Responden Tentang Responsivitas
(Tanggap Terhadap Semua Partisipasi dan Aspirasi) Berupa Cepat Tanggap Dan
Bekerja Keras Dalam Mewadahi Aspirasi Para Anggota Yang Membutuhkan KPR

Alternatif Jawaban	f	%	x	f(x)	B
Selalu	7	7	5	35	M = $\frac{290}{100}$ = 2,9
Sering	14	14	4	56	
Kadang-Kadang	53	53	3	159	
Tidak Pernah	14	14	2	28	
Tidak Tahu	12	12	1	12	
Jumlah	100	100		290	Cukup

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2006.

Rekapitulasi penafsiran responden pada dimensi responsivitas adalah seperti tampak pada Tabel-4.18 di bawah ini. Adapun tingkat penafsiran rata-ratanya adalah 3,47 atau 'Baik'.

Tabel – 4.18
Rekapitulasi Penafsiran Responden
Dimensi Responsivitas

Indikator	Kriteria
-Kepekaan terhadap setiap persoalan yang muncul	4,03
-Tanggap terhadap semua partisipasi dan aspirasi	2,9
Nilai Rata-rata	3,47 atau Baik

Pada Tabel-4.19 di bawah ini tampak hasil rekapitulasi penafsiran responden tentang variabel penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyediaan KPR, sedangkan nilai rata-ratanya adalah 3,37 atau 'Cukup'.

Tabel – 23
Rekapitulasi Penafsiran Responden
Variabel Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance
Dalam Penyediaan KPR

Dimensi	Kriteria
-Transparansi	2,59
-Akuntabilitas	3,97
-Keadilan	3,46
-Responsivitas	3,47
Nilai Rata-rata	3,37 atau Cukup

Atas dasar data dan rekapitulasi dari variabel yang diteliti maka dapatlah dikatakan bahwa dimensi transparansi dalam proses penyediaan KPR masih lemah. Namun apabila dilihat secara keseluruhan melalui nilai-rata-ratanya yaitu sebesar 3,37 atau 'Cukup', maka dapatlah dikatakan bahwa proses penyediaan KPR untuk anggota di lingkungan Satker Denmabesal sudah berjalan cukup baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

C. Analisa *Kualitatif* Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyediaan KPR Bagi Anggota TNI AL.

1. Dimensi Transparansi.

BUILD³³ dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan LAN menyebutkan bahwa transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Sedangkan Tjokroamidjojo³⁴ dalam buku yang sama menjelaskan bahwa dalam transparansi tidak membolehkan cara-cara manajemen tertutup. Atas dasar tersebut maka indikasi-indikasi dimensi transparansi dalam penyediaan KPR untuk anggota TNI AL di lingkungan Mabes TNI AL seperti yang ditunjukkan pada Tabel-4.1 sampai dengan Tabel-4.7 merupakan kondisi konkrit yang ada pada saat ini, dimana secara keseluruhan memiliki tingkat interpretasi responden sebesar 2,59 atau 'buruk'. Indikasi terburuk bersumber dari sangat kurangnya komunikasi dua arah dalam informasi dan aspirasi. Selain itu juga sungguh ironis dimana informasi hampir 90 % dapat diperoleh akan tetapi langkah konkrit berupa partisipasi anggota untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan adalah 'nihil'.

Pada sisi lain penyediaan KPR bagi anggota TNI AL merupakan perwujudan dari pembinaan personel guna mendukung integritas jati diri parjurit TNI AL agar dapat melaksanakan pengabdianya secara utuh dan simultan. Oleh karena itu adanya transparansi dalam rangka penyediaan KPR bagi anggota TNI AL mempunyai peranan yang cukup penting. Gejala ketidak puasan konsumen dengan adanya kurang transparansi dalam penyediaan KPR untuk anggota TNI AL tidak pernah

³³)LAN, *op., cit.*, hal. 23

³⁴)*Ibid*, hal. 24

dapat tersalurkan untuk diartikulasikan dalam bentuk protes atau 'demo', mengingat sifat organisasi TNI AL adalah organisasi militer yang cenderung otoriter dan melakukan komunikasi searah. Hal senada dikemukakan oleh Kasi Faswatpers Diswatpersal³⁵ bahwa "*belum pernah ada anggota TNI AL yang protes atas kebijakan yang diambil dalam bidang penyediaan KPR*". Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa transparansi dalam proses penyediaan KPR untuk anggota TNI AL perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan TNI AL karena bila dibiarkan terus menerus seperti itu akan memberikan dampak secara tidak langsung pada pembangunan moril dan jati diri prajurit di medan tugas.

Hasil wawancara penulis dengan Kadiswatpersal³⁶ seiring adanya indikasi tersebut di atas menyebutkan bahwa "*keberhasilan penyediaan KPR untuk anggota tidaklah harus dilatarbelakangi oleh manajemen yang transparan*". Pada pernyataan tersebut tampaknya bahwa proses penyediaan KPR merupakan program yang bersifat tugas dari pimpinan untuk dilaksanakan, sehingga terkesan sebagai sebuah perintah. Padahal bila dikaji lebih jauh terutama pada sisi sumber penyediaan dana untuk pembangunan KPR adalah bersumber dari anggota berupa tabungan wajib disiplin, maka seyogyanya pimpinan harus memihak kepada kepuasan konsumen. Konsumenlah yang harus dikedepankan kepentingan dan kebutuhannya agar KPR yang diterima betul-betul memenuhi apa yang menjadi harapannya. Upaya kearah transparansi tampaknya sudah ada namun belum terfokus dan jelas bila mengacu pada hasil wawancara dengan Kadiswatpersal yang mengatakan "*....moga-moga dengan adanya penyelenggaraan penyediaan KPR secara integrative dengan melibatkan unit-unit lain akan dapat memenuhi kepentingan semua pihak*".

³⁵)Letkol Laut (KH) Suradal.

³⁶)Laksamana Pertama Hari Yuwono

2. Dimensi Akuntabilitas.

BUILD³⁷ dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan LAN (2004:23) menyebutkan bahwa akuntabilitas hendaknya dimiliki oleh para pengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan agar para penyelenggara negara memiliki tanggung jawab kepada publiknya tentang tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Sehingga sering dikatakan bahwa *accountability* (akuntabilitas), merupakan tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan, dari *governance* yang dilakukan.

Menurut Ghartey³⁸ bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain; apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya.

Dengan demikian akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sehingga akuntabilitas merupakan sikap dan watak kehidupan manusia berupa suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi

³⁷) LAN, *op. cit.*, hal. 23

³⁸) *Ibid*, hal 35

kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Oleh karenanya dalam konteks akuntabilitas yang menjadi tuntutan adalah keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan termasuk keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang mencakup baik perilaku yang bersifat pribadi maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan orang sekeliling.

Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan akuntabilitas yang perlu diselenggarakan dalam lingkungan instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
4. Harus beroentasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh,
5. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Oleh karenanya di atas telah penulis sebutkan bahwa pertanggung jawaban (akuntabilitas) dalam proses penyediaan KPR merupakan upaya pengendalian agar proses penyediaan KPR menjadi terukur dan terkendali. Hal inilah salah satu wujud

dari upaya menciptakan akuntabilitas dalam proses penyediaan perumahan untuk anggota. Adapun salah satu indikasi bahwa akuntabilitas telah dijalankan adalah dimana tersedianya rumah (KPR) yang sesuai dengan usulan atau aspirasi yang disampaikan oleh calon debitur kepada produsen. Berdasarkan nilai rata-rata dari tingkat interpretasi responden pada indikator ini diperoleh angka 3,97 atau 'Baik'. Artinya bahwa proses penyediaan KPR untuk anggota telah cukup baik atau mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Hal senada juga disampaikan oleh Kadiswatpersal bahwa "*Irjenal dan BPK telah memberikan respon yang positif dalam proses penyediaan KPR untuk anggota*". Demikian pula secara terpisah hasil wawancara penulis dengan anggota debitur yang telah mendapat KPR yaitu Bapak Suryadi (anggota PNS Subdis Persip) menyebutkan bahwa "*...memang pola hidup saya sekarang sudah teratur dan tenang serta dapat datang masuk kerja tepat waktu*".

3. Dimensi Keadilan.

Tjokroamidjojo³⁹ mengemukakan bahwa Fairness (jaminan keadilan), A level of playing field (perlakuan yang adil/kesetaraan) ini berlaku bagi pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan publik, perusahaan kepada pelanggan, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan keadilan yang diberikan lembaga TNI AL sebagai institusi militer hendaknya mampu memberikan jaminan keadilan kepada anggotanya khususnya dalam penyediaan KPR minimal keadilan dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas dalam mengurus atau mendapatkan KPR sehingga dapat dirasakan oleh semua strata dan golongan.

³⁹)Ibid, hal. 21-22

Berdasarkan hasil angket yang dideskripsikan pada pada Tabel-4.13 sampai dengan Tabel-4.14 maka dapatlah diketahui bahwa tingkat penafsiran responden dalam hal ini sebesar 3,46 atau 'Baik', artinya bahwa dalam penyediaan KPR sudah mencerminkan adanya jaminan keadilan. Hal senada juga telah dinyatakan oleh Kadiswatpersal bahwa "*...distribusi KPR untuk anggota telah didistribusikan secara proporsional sesuai strata kepangkatan yang membutuhkan KPR*". Sedangkan menurut pendapat Bapak Suradal bahwa "*...kami telah memperlakukan para debitur dengan sebaik-baiknya bahkan kami anggap debitur adalah para pelanggan kami yang harus dilayani*".

4. Dimensi Responsivitas.

UNDP⁴⁰ menegaskan bahwa Lembaga-lembaga negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani stakeholdersnya. Artinya memiliki kemampuan untuk menanggapi aspirasi masyarakatnya (*clientele*). Kepedulian yang tinggi terhadap para anggota hendaknya harus mampu difasilitasi dan diterima untuk mendapat tanggapan yang selayaknya dengan baik.

Demikian pula kepekaan terhadap aspirasi para anggotanya untuk mendapatkan informasi dan administrasi KPR seyogyanya mampu dijawab dengan responsif. Artinya, bahwa aspirasi bahkan partisipasi para anggota hendaknya mendapat pelayanan dengan cepat, mudah, murah dan baik sehingga anggota merasa 'puas' dan 'senang'. Pada Tabel-4.16 sampai dengan Tabel-4.17 menunjukkan bahwa tingkat penafsiran responden terhadap masalah ini sudah baik dan memiliki tingkat penafsiran sebesar 3,47. Kenyataan ini dibenarkan oleh Kadiswatpersal bahwa "*...guna mengantisipasi adanya feedback dalam pelayanan penyediaan KPR maka*

⁴⁰Ibid, hal 22

telah kami sediakan kesempatan kepada para debitur untuk mengirimkan koreksi atau evaluasi pada perkesempatan pertama baik via HP atau surat tertulis". Hal ini berarti bahwa Dinas telah memfasilitasi berupa media untuk menampung aspirasi yang mungkin muncul baik sebagai reaksi pemberian KPR atau mungkin ide-ide kreatif dari para debitur.

E. Analisa Hasil Penelitian.

Indikasi awal permasalahan yang dapat penulis tangkap dalam proses penyediaan KPR untuk anggota adalah bahwa penyediaan KPR terkesan kurang sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga penyediaan KPR tidak mampu menggambarkan suatu hasil dari proses *transparent, accountable dan responsive*, dan pada akhirnya mengakibatkan pembinaan personel menjadi kurang efektif dan lemah. Namun berdasarkan hasil pengumpulan melalui data primer diperoleh informasi bahwa prinsip-prinsip *good governance* pada sebagian besar dalam proses penyediaan KPR telah diselenggarakan dengan cukup optimal. Adanya indikasi penafsiran pada dimensi 'transparansi' berlabel 'buruk' dapat penulis tafsirkan bahwa hal tersebut bersumber dari sangat kurangnya komunikasi dua arah dalam informasi dan aspirasi. Hal ini ditenggarai oleh adanya arus informasi hampir 90 % dapat diperoleh akan tetapi langkah konkret berupa partisipasi anggota untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan adalah 'nihil'. Akibatnya menimbulkan kecenderungan para debitur kehilangan pilihan terbaiknya dalam mewujudkan impiannya berupa sebuah rumah yang sesuai dengan harapannya.

Demikian pula bila dilihat dari sisi lainnya yaitu dari sisi organisatoris dimana proses penyediaan KPR diselenggarakan, maka gejala mode kepemimpinan militeristik adalah sangat memungkinkan, sehingga komunikasi dua arah cenderung

tidak berjalan atau tersumbat oleh hierarki, disiplin dan kehormatan militer. Oleh karenanya Baladjarumal sebagai unit pelaksana dalam penyediaan KPR hendaknya mampu menjembatani tersumbatnya arus informasi dan aspirasi dari para debitur, agar kepuasan debitur bisa tercapai dengan optimal.

Asumsi pertama yang penulis ajukan bahwa *penyediaan KPR untuk anggota TNI AL diselenggarakan dengan memenuhi unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, adil dan responsif* adalah '**dapat diterima**'. Artinya, bahwa unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, adil dan responsif seperti tersebut dalam hipotesis memang dibutuhkan dalam penyediaan KPR untuk anggota TNI AL. Demikian pula untuk asumsi yang kedua bahwa *penyediaan KPR untuk anggota TNI AL dapat terselenggara dengan optimal, apabila memenuhi harapan dari anggota yang menerima KPR* adalah '**dapat diterima**'. Artinya, bahwa penyediaan KPR untuk anggota TNI AL sudah cukup optimal karena *outcomes* yang dapat diterima sebagai akibat dari adanya penyediaan KPR sebagian besar telah memenuhi harapan dari anggota yang menerima KPR.

Atas dasar hasil analisis tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa *unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, adil dan responsif* pada suatu organisasi militer adalah penting dan sangat dibutuhkan oleh para anggotanya. Selain itu juga dapat menjadi suatu masukan bagi pimpinan TNI AL guna mengembangkan proses pembelajaran organisasi (*learning organization*) di masa depan.

Adapun hambatan *langsung* yang menjadi kendala penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL adalah sikap dan perilaku para pejabat institusi baik di lingkungan Diswatpersal, Baladjarumal, Disfaslanal dan Diskual yang belum seutuhnya berpihak kepada kepentingan debitur yaitu para penghuni KPR TNI AL. Sedangkan hambatan *tidak langsung* yang menjadi

kendala penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL adalah birokrasi pelayanan yang diselenggarakan dalam nuansa 'militeristis'. Nuansa *Good Governance* berupa penyelenggaraan organisasi yang terbuka dan transparan yang diindikasikan adanya suasana demokratis antara penyelenggara pemerintahan dengan publik yang diaturnya, cenderung memiliki asas yang bertentangan dengan suatu organisasi tertutup atau berkarakter 'militeristis' yang kaku dan otoriter dengan fungsi output berupa 'readness' (Siaga).

Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyediaan KPR bagi anggota TNI AL adalah seperti apa yang dilakukan oleh Kadiswapersal berupa pelayanan kotak saran dan evaluasi baik melalui surat maupun via SMS. Artinya, sudah ada kemauan dari para pemimpin institusi yang terkait dengan penyediaan KPR untuk menciptakan 'atmosfir' keterbukaan walaupun dalam batas-batas ruang lingkup publik organisasi TNI AL.

*anggota TNI AL dapat terselenggara dengan optimal, apabila penyediaan KPR tersebut memenuhi harapan dari anggota yang menerima KPR adalah 'dapat diterima'. Artinya, bahwa penyediaan KPR untuk anggota TNI AL sudah cukup optimal karena *outcomes* yang dapat diterima sebagai akibat dari adanya penyediaan KPR sebagian besar telah memenuhi harapan dari anggota yang menerima KPR.*

5. Hambatan langsung dan tidak langsung dalam proses penerapan *unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, adil dan responsif* pada proses penyediaan KPR sangat terkait dengan karakteristik organisasi militer yang cenderung 'tertutup' dalam proses penyediaan KPR.
 6. Upaya kearah transparansi dan memberikan pelayanan prima tampaknya sudah ada 'itikad baik' berupa media 'saran dan evaluasi' melalui surat dan SMS.
- b. **Saran.**
1. Seyogyanya pimpinan harus memihak kepada kepuasan konsumen. Konsumentenlah yang harus dikedepankan kepentingan dan kebutuhannya agar KPR yang diterima betul-betul memenuhi apa yang menjadi harapannya.
 2. Transparansi dalam proses penyediaan KPR untuk anggota TNI AL perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan TNI AL, karena bila dimensi ini dibiarkan terus menerus mendapatkan penafsiran 'buruk', maka akan memberikan dampak secara tidak langsung pada pembangunan moril dan jati diri prajurit dalam pelaksanaan tugas.

3. Baladjarumal sebagai unit pelaksana dalam penyediaan KPR hendaknya mampu menjembatani tersumbatnya arus informasi dan aspirasi dari para debitur, agar kepuasan debitur bisa tercapai dengan optimal.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- M. Barzelay and B. Armajani, 1992. *Breaking Trough Bureaucracy A New Vision For Managing Government*, Berkeley: University Of California Press
- Frederickson, H. George Frederickson, 1994. *Administarsi Negara Baru*, Jakarta : LP3ES, Cet. Keempat.
- Sutrisno Hadi, 1995. *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, Jilid 4.
- Kismartini, dkk., 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Kencana, Inu, 1999. *Pengantar Administrasi Publik*, Jakarta : Rineka Cipta, Cet. Pertama.
- LAN, 2004. *Modul : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta : LAN
- LAN, 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) Buku I Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara, Buku 1, Cet. I, Feb 2003.
- Nogi. S, Hessel, 2004. *Analisis Kebijakan Publik Kontemporer*, Yogyakarta : Lukman Offset.
- David Osborne & T. Gaebler, 1993. *Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*, New York: Phime
- Siagian, S.P., 1983. *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, Cet. Keduabelas.
- Sugiono, 1991. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Stewart, T.A, 1993. *Reengineering The Hot New Managing Tool*, Fortune Magazine.
- Sujana, 1989. *Metoda Sataistika*, Jakarta : Jembatan Tiga, 1989
- Thoha, Miftah, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta : CV. Rajawali, Cet. Pertama Tahun 1984.

Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Lampiran : 01

Jakarta, September 2006

Nomor :/IX/2006/Khusus
 Hal : Pengisian Angket
 Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada : Yth. Bapak/Ibu/Sdr

.....

di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan *Kebijakan TNI AL bidang penyediaan KPR bagi anggota TNI AL*, peneliti bermaksud menyebarkan angket (terlampir) dan mengharapkan sekali kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisinya.

Mengingat data yang diperlukan tersebut itu sangat besar artinya bagi pengambilan keputusan oleh Pemimpin TNI AL, maka peneliti sekali lagi mengharapkan bahwa dalam pengisian angket ini dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan kerahasiaan atau informasi yang Bapak/Ibu berikan dijamin oleh peneliti. Perlu diketahui pula bahwa angket ini hanya dipergunakan untuk penelitian semata-mata dan tidak dipublikasikan.

Atas perhatian dan kesediaan serta bantuan Bapak/Ibu peneliti mengucapkan terima kasih.

Jakarta, September 2006

Terima Kasih

Peneliti

PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan situasi yang sebenarnya, dengan cara memberi tanda silang (X) pada kolom jawaban-jawaban yang telah tersedia. Kriteria pilihan jawaban pada kolom 1 bila pendapat Bapak/Ibu terhadap masalah yang ditanyakan memiliki kualifikasi “Selalu/Sangat Setuju”, Kolom 2 bila berkualifikasi “Sering/Setuju”, Kolom 3 bila berkualifikasi “Kadang-Kadang/Jarang”, Kolom 4 bila berkualifikasi “Tidak Pernah/Tidak Setuju” dan Kolom 5 bila berkualifikasi “Tidak Tahu”.
2. Mengingat data yang bersangkutan sangat besar artinya bagi peneliti, maka dimohon dalam pengisian angket ini dilakukan secara benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada.
3. Kerahasiaan akan jawaban responden terjamin sepenuhnya

Terima Kasih

ANGKET PENELITIAN TERTUTUP TENTANG

KEBIJAKAN KASAL BIDANG PENYEDIAAN KPR BAGI ANGGOTA TNI AL

Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom disebelah kanan kolom pertanyaan yang sesuai dengan jawaban dimaksudkan, yaitu sebagai berikut :

1. Kolom 1 menyatakan : Selalu/Sangat Setuju
2. Kolom 2 menyatakan : Sering/Setuju
3. Kolom 3 menyatakan : Kadang-kadang/Jarang
4. Kolom 4 menyatakan : Tidak Pernah/Tidak Setuju
5. Kolom 5 menyatakan : Tidak Tahu

DAFTAR PERNYATAAN RESPONDEN

NO.	PERNYATAAN	JAWABAN				
		1	2	3	4	5
	1. <i>Transparan.</i>					
1.	Diberi informasi bahwa akan ada pembangunan perumahan untuk anggota (KPR)					
2.	Dilibatkan dalam perencanaan penyediaan perumahan untuk anggota (KPR)					
3.	Diberikan pilihan alternatif dalam menentukan lokasi perumahan (KPR)					
4.	Disediakan kotak saran atau aspirasi bagi anggota dalam rangka penyediaan perumahan (KPR)					
5.	Diberikan kesempatan untuk melihat atau peninjauan lapangan (lokasi) terhadap perumahan contoh yang akan dibangun (KPR).					
6.	Tersedianya informasi atau rumah contoh untuk standarisasi pembangunan perumahan (KPR) yang dilakukan.					
7.	Proses penyediaan KPR dapat dipantau atau dimonitor oleh semua anggota.					
	2. <i>Akuntabilitas.</i>					
8.	Rumah (KPR) sesuai dengan usulan atau aspirasi yang disampaikan					
9.	Rumah (KPR) memiliki kondisi fisik sesuai dengan rencana semula					
10.	Pertanggungjawaban dalam penyediaan perumahan dapat diterima atau dimengerti					
	3. <i>Keadilan</i>					
11.	Keadilan dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas dalam mengurus atau mendapatkan KPR dirasakan oleh semua strata dan golongan.					

12.	<p>Anggota diperlakukan sebagai mitra sekaligus pelanggan dalam mengurus administrasi untuk mendapatkan KPR</p> <p>4. <i>Responsivitas</i></p>					
13.	<p>Aspirasi para anggota untuk mendapatkan informasi dan administrasi KPR mendapat pelayanan yang cepat, mudah, murah dan baik.</p>					
14.	<p>Dinas cepat tanggap dan berusaha bekerja keras untuk mewadahi aspirasi dari para anggota yang membutuhkan KPR.</p>					

Terima Kasih

Jakarta, September 2006

Peneliti

Sri Pudyorini
014287633

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran : 02

DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

1. Apakah anda yakin bahwa kunci keberhasilan penyediaan KPR ditentukan oleh baiknya dalam proses formulasi kebijakan publik ?

Jawab :

"Keberhasilan penyediaan KPR untuk anggota tidaklah harus dilatarbelakangi oleh manajemen yang transparan" (Kadiswatpersal, 12 April 2007, Jam 13.10).

2. Adakah upaya Anda agar dimensi transparansi bisa terwujud dengan baik ?

Jawab :

"...moga-moga dengan adanya penyelenggaraan penyediaan KPR secara integrative dengan melibatkan unit-unit lain akan dapat memenuhi kepentingan semua pihak" (Kadiswatpersal, 12 April 2007, Jam 13.10).

3. Apakah ada anggota yang protes dalam proses pemberian KPR kepada anggota ?

Jawab :

"Belum pernah ada anggota TNI AL yang protes atas kebijakan yang diambil dalam bidang penyediaan KPR" (Kasi Faswatpers Diswatpersal, 12 April 2007, jam 10.30).

4. Apakah anda yakin bahwa akuntabilitas penyediaan KPR sudah baik?

Jawab :

"Irjenal dan BPK telah memberikan respon yang positif dalam proses penyediaan KPR untuk anggota". (Kadiswatpersal, 12 April 2007, Jam 13.10)

5. Bagaimana perasaan Anda setelah mendapatkan KPR dari TNI AL ?

Jawab :

"...memang pola hidup saya sekarang sudah teratur dan tenang serta dapat datang masuk kerja tepat waktu". (Bapak Suryadi, PNS Subdis Persip, 10 Mei 2007, jam 13.30).

6. Apakah anda yakin bahwa penyediaan KPR untuk anggota telah memberikan rasa keadilan bagi anggota ?

Jawab :

"...distribusi KPR untuk anggota telah didistribusikan secara proporsional sesuai strata kepangkatan yang membutuhkan KPR". (Kadiswatpersal, 12 April 2007, Jam 13.10)

7. Apakah ada yakin bahwa dalam penyediaan KPR sudah cukup adil ?

Jawab :

"...kami telah memperlakukan para debitur dengan sebaik-baiknya bahkan kami anggap debitur adalah para pelanggan kami yang harus dilayani" (Kasi Faswatpers Diswatpersal, 12 April 2007, jam 10.30).

8. Apakah anda yakin bahwa Anda cukup peduli dalam merespon aspirasi kebutuhan perumahan bagi anggota ?

Jawab :

“...guna mengantisipasi adanya feedback dalam pelayanan penyediaan KPR maka telah kami sediakan kesempatan kepada para debitur untuk mengirimkan koreksi atau evaluasi pada perkesempatan pertama baik via HP atau surat tertulis” (Kadiswatpersal, 12 April 2007, Jam 13.10)

Terima Kasih

Jakarta, Juni 2007

Peneliti

Sri Pudyorini
014287633

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel-AA
NILAI JAWABAN RESPONDEN
ASPEK PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

RES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	SKORE	
1	4	1	2	2	3	2	2	1	5	4	3	2	5	2	40	
2	3	2	2	2	3	1	5	2	4	5	4	1	5	1	40	
3	3	2	2	1	2	3	3	2	3	4	4	3	4	3	41	
4	4	1	2	2	1	3	3	2	4	5	3	3	5	3	43	
5	4	1	1	2	2	4	3	2	2	4	3	2	3	2	35	
6	3	2	1	2	1	3	4	2	4	4	3	3	4	3	39	
7	4	1	1	1	1	2	5	2	2	2	4	2	5	2	34	
8	5	1	1	2	3	2	3	2	4	4	4	1	5	1	40	
9	3	2	3	1	1	2	5	2	3	5	2	3	2	3	38	
10	5	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	4	5	4	43	
11	5	2	2	2	1	4	5	2	5	4	5	4	5	4	48	
12	3	2	2	2	3	5	4	2	5	2	5	3	3	3	44	
13	4	2	2	2	2	3	5	2	4	5	4	2	5	3	42	
14	3	1	3	2	2	4	3	2	5	3	5	3	3	3	42	
15	3	2	1	2	3	3	5	2	4	4	4	2	5	5	43	
16	4	2	3	2	2	5	5	3	5	5	3	3	4	3	47	
17	5	1	2	2	3	4	5	3	2	4	3	4	5	4	47	
18	4	1	2	2	2	3	5	2	5	5	5	3	5	3	45	
19	5	2	1	1	1	3	3	5	1	4	3	4	3	3	41	
20	3	1	2	2	2	3	5	2	2	4	4	3	2	3	38	
21	3	1	2	2	2	4	5	1	4	4	4	2	5	2	41	
22	5	2	3	2	2	3	3	1	3	4	5	5	3	5	46	
23	3	1	3	2	1	2	5	3	3	4	3	4	2	4	40	
24	4	1	2	2	2	5	5	1	5	5	5	3	5	3	49	
25	2	2	1	2	3	3	2	1	4	4	4	3	1	3	35	
26	4	1	3	2	2	5	5	3	3	4	3	3	4	3	43	
27	4	2	2	1	2	5	4	1	4	4	4	4	3	3	44	
28	3	2	1	2	2	1	3	1	3	5	4	5	4	5	41	
29	4	1	2	1	1	2	5	1	4	5	4	5	4	5	37	
30	4	2	2	1	2	1	5	2	2	5	5	1	1	1	38	
31	3	3	1	1	2	3	5	2	3	4	3	5	5	3	43	
32	4	2	2	1	1	5	5	2	5	4	5	3	5	3	47	
33	5	2	3	2	2	1	4	3	3	5	3	1	4	1	39	
34	5	2	2	1	2	4	3	3	3	3	4	5	4	4	45	
35	5	2	2	1	1	3	2	2	4	5	4	5	3	5	44	
36	4	2	2	1	2	3	4	1	5	3	5	3	4	3	42	
37	4	1	2	1	1	2	3	2	5	4	5	2	5	2	41	
38	3	1	1	2	1	1	3	3	4	3	4	1	5	1	34	
39	3	2	2	1	2	3	5	2	4	4	3	2	3	3	40	
40	4	2	1	2	1	3	5	2	2	5	4	3	5	3	42	
41	4	1	2	2	1	3	5	2	4	4	4	2	3	2	41	
42	3	2	1	2	1	3	3	1	3	4	4	3	1	3	34	
43	4	1	2	2	5	4	5	4	4	4	4	2	5	2	45	
44	5	2	1	1	1	1	3	1	2	4	4	1	3	1	30	
45	5	1	1	1	2	3	4	1	3	5	5	3	5	3	44	
46	3	2	3	2	1	1	3	3	3	3	4	3	4	3	38	
47	5	2	3	1	2	3	3	1	5	4	4	3	4	4	44	
48	3	2	2	2	1	3	3	1	5	5	5	3	4	3	44	
49	4	1	1	1	2	3	3	2	4	5	4	3	5	3	43	
50	3	2	3	2	2	3	3	1	5	5	5	3	3	3	43	
51	3	2	2	2	1	3	5	1	4	4	4	3	5	3	42	
52	4	2	3	2	2	4	3	3	3	5	3	3	4	3	44	
53	5	2	2	2	3	3	5	3	3	4	3	4	5	4	48	
54	4	2	2	2	2	4	1	3	3	3	3	3	3	3	44	
55	5	2	1	2	3	5	5	1	4	3	4	3	3	3	44	
56	3	3	2	2	1	2	3	3	1	2	4	4	3	5	3	41
57	3	2	2	1	1	3	3	1	4	4	4	2	5	2	37	
58	5	1	3	2	2	1	4	1	5	4	5	5	3	5	46	
59	3	2	2	2	1	4	5	3	3	4	3	4	5	4	45	
60	4	1	1	2	2	3	3	1	3	5	3	5	3	3	43	
61	2	3	2	2	2	3	5	1	4	4	4	3	5	3	43	
62	4	1	3	1	1	3	5	3	3	4	3	2	4	3	41	
63	4	2	2	1	2	3	3	1	4	4	4	3	5	3	43	
64	3	2	2	1	2	3	3	1	3	5	4	5	4	5	43	
65	4	1	1	2	3	1	5	1	4	5	4	1	5	1	38	
66	4	2	2	2	4	2	2	1	5	5	5	1	5	1	41	
67	4	1	2	2	2	3	5	1	5	4	5	3	5	3	45	
68	5	2	2	2	2	3	3	2	5	4	5	3	5	3	45	
69	5	2	1	1	1	2	5	3	3	3	3	1	4	1	37	
70	5	3	2	1	2	4	3	3	4	3	4	5	5	4	46	
71	5	3	1	1	2	4	4	2	4	3	4	5	3	5	45	
72	4	1	2	1	2	3	3	2	5	3	5	3	4	3	41	
73	4	3	2	2	1	4	5	2	5	4	5	2	5	2	45	
74	3	2	1	1	2	1	2	2	4	5	4	1	5	1	34	
75	3	3	2	1	2	3	3	3	2	4	3	3	3	3	38	
76	4	2	1	2	2	3	3	2	3	5	4	3	5	3	42	
77	4	1	2	1	1	3	5	2	4	4	2	2	3	2	36	
78	3	1	1	1	2	3	2	1	2	4	4	3	5	3	35	
79	4	2	2	1	2	3	3	2	4	3	1	2	2	2	33	
80	5	2	1	1	3	1	4	2	4	4	4	1	5	1	38	
81	3	2	2	1	2	3	5	2	5	5	5	3	2	3	43	
82	3	2	3	1	1	4	3	3	3	5	3	4	5	4	44	
83	5	1	2	1	2	2	1	5	6	5	4	3	4	4	41	
84	3	2	2	1	1	3	4	1	5	3	3	3	5	3	43	
85	4	2	1	1	1	3	4	2	4	3	4	3	5	3	40	
86	3	2	1	1	1	3	5	2	5	4	5	3	3	2	40	
87	3	3	2	1	2	4	3	2	4	4	4	3	5	3	43	
88	4	2	1	1	1	3	5	3	3	2	3	3	4	3	38	
89	3	1	2	1	2	2	4	3	3	4	3	4	5	4	43	
90	4	2	2	2	2	3	2	2	5	3	5	3	3	3	41	
91	3	3	1	1	3	3	5	2	4	5	4	2	3	3	42	
92	3	1	2	1	1	3	5	2	4	4	4	3	2	3	38	
93	3	1	2	1	2	4	3	2	4	4	2	4	5	2	37	
94	5	2	3	3	2	3	4	1	5	3	5	5	3	5	47	
95	3	1	2	2	3	1	4	3	4	3	4	3	4	4	40	
96	4	2	1	2	2	3	5	1	5	2	5	3	2	3	40	
97	1	3	2	1	1	2	2	1	4	4	4	3	5	3	36	
98	4	2	5	1	2	3	5	3	3	2	3	4	3	3	41	
99	4	2	2	1	2	3	3	3	4	3	3	5	3	2	40	
100	2	1	1	1	3	4	4	1	4	4	3	5	3	3	37	
TOTAL	382	173	186	150	186	294	378	400	382	403	400	291	403	290	4340	

Sumber : Hasil Pengukuran, 2006